



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

- Menimbang: a . bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023;
- b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- c . bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008, Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Enrekang Tahun 2011 – 2023);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 - 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik adalah Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang.
4. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Enrekang.
8. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 – 2023
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik untuk periode 1(satu) tahun.
10. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Bab. II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab. III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

Bab. IV Tujuan dan Sasaran

Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab. VIII Penutup

- (4) Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik melaporkan hasil

pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Indikator kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Kerangka pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra merupakan angka indikatif, yang akan di sesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA &
STATISTIK KABUPATEN ENREKANG TAHUN
2018 - 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Enrekang sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Enrekang umumnya dan khususnya Dinas Komunikasi informatika & Statistik memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel. Data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota, tetapi juga oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Dinas Komunikasi informatika & Statistik di Kabupaten Enrekang bertumpuh pada pembangunan Komunikasi informatika & Statistik yang ditujukan untuk meningkatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Statistika sumber daya manusia dalam dunia informasi. Usaha-usaha tersebut telah dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan .

Di samping itu, upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyediaan jasa Komunikasi informatika & Statistik juga dilaksanakan melalui penyempurnaan peraturan, kelembagaan dan pengelolaan jasa Komunikasi informatika & Statistik serta semakin diusahakan pula peningkatan keandalan dan mutu pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun di beberapa bidang kegiatan masih dihadapi berbagai kendala dan hambatan yang perlu diatasi untuk tersedianya jasa Komunikasi informatika & Statistik yang cukup, aman dan lancar.

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi termasuk metodologi Statistik, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, khususnya oleh Dinas Komunikasi informatika & Statistik Kabupaten Enrekang. sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Komunikasi Dan Informasi dan teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang Komunikasi Dan Informasi dan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi informatika & Statistik Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor Komunikasi Dan Informasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Enrekang .

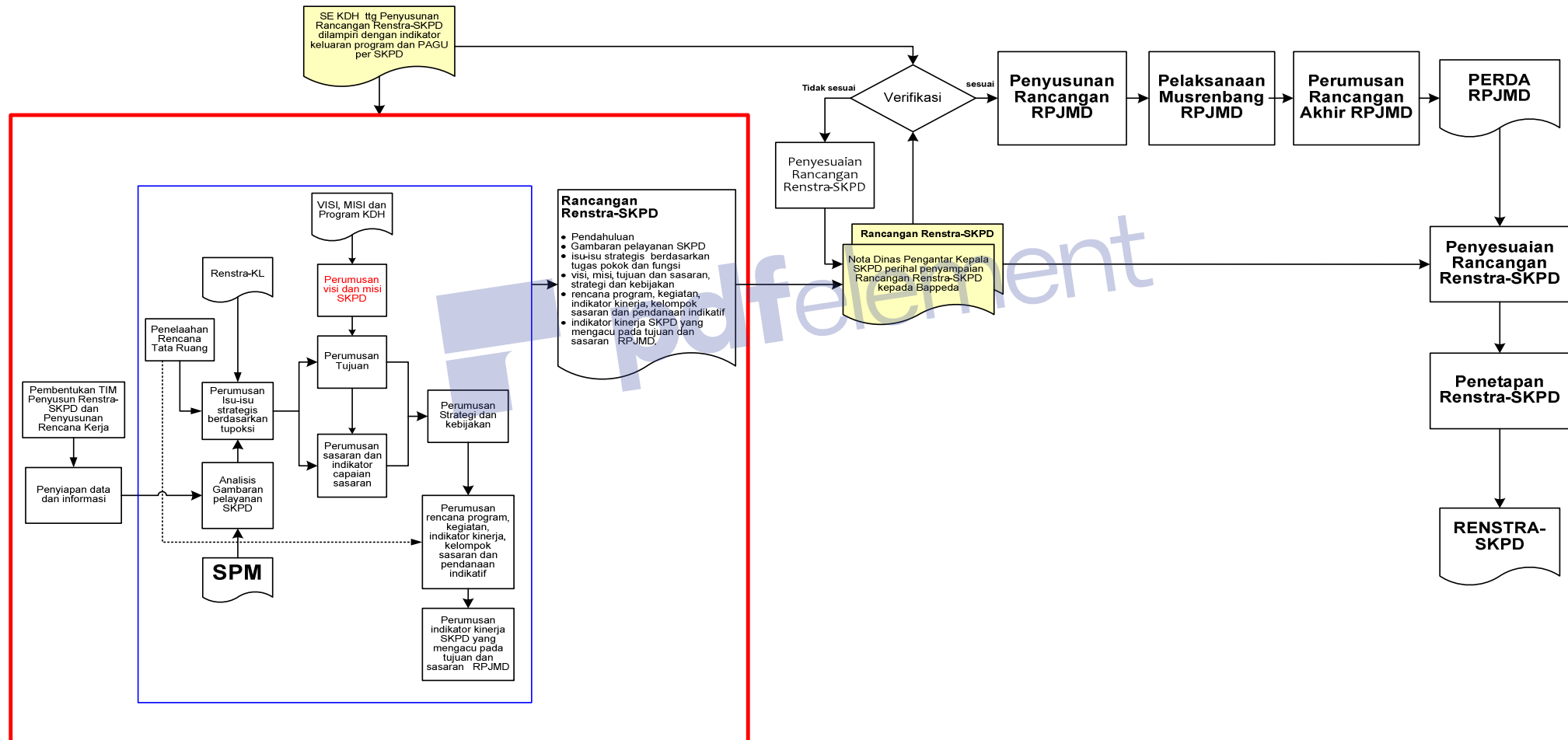
Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan Komunikasi informatika & Statistik, yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor Komunikasi informatika & Statistik di Kabupaten Enrekang dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Adapun tahapan penyusunan renstra adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan



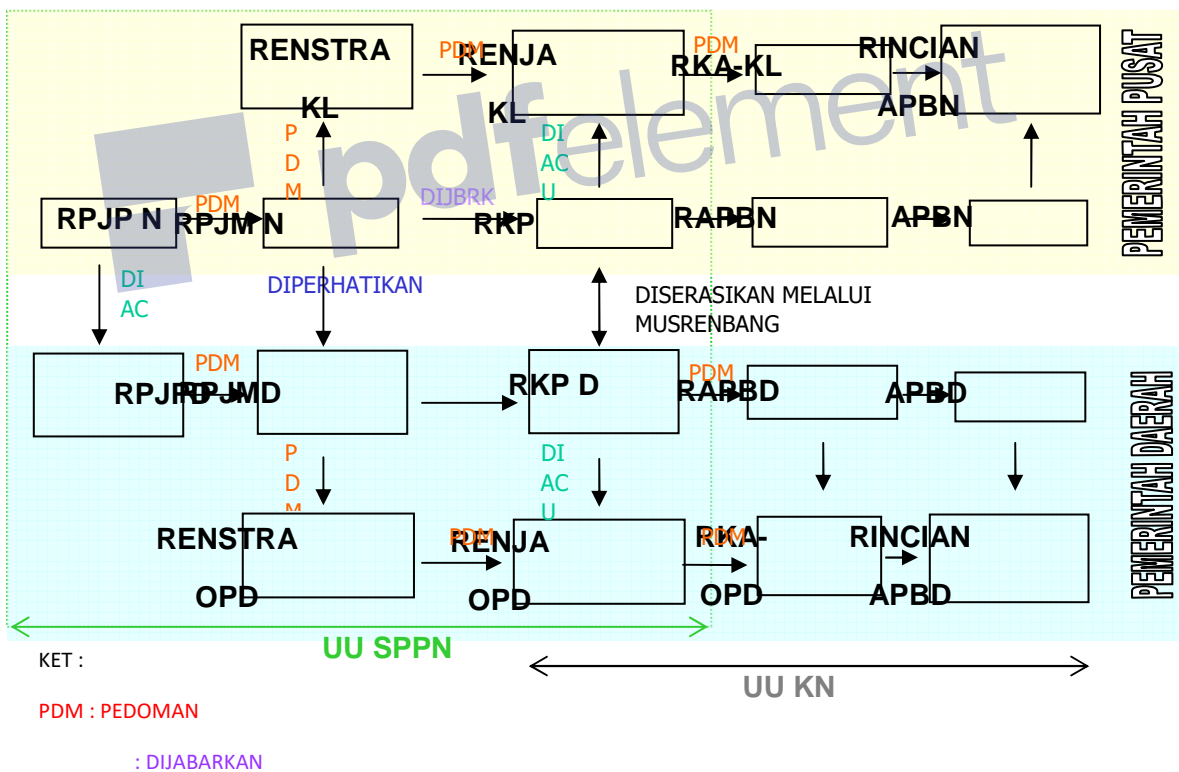
BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD



1. Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah daerah tersebut, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta Renstra-OPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.5.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra-OPD yang berpedoman pada RPJMD, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD). Dokumen Renstra-OPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi informatika & Statistik Kabupaten Enrekang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 9. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pejabat Pelayanan Informasi Daerah (PPID);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
 18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
20. Peraturan Menteri telekomunikasi informatika Nomor 13 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemda di Bidang Komunikasi informatika;
 21. Peraturan Menteri telekomunikasi informatika Nomor 16 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi informatika ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri telekomunikasi informatika Nomor 41 tahun 2007 tentang Panduan umum Tata Kelola TIK Nasional (Teknologi Informasi Komunikasi);
 24. Peraturan Menteri Komunikasi informatika & Statistik Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi informatika & Statistik Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
 25. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Selatan ;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008, Nomor 14);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 – 2023);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);
31. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 28).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
35. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Domain, Subdomain dan Nama email Resmi Pemkab. Enrekang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi informatika & Statistik, Komunikasi informatika Kabupaten Enrekang 2019–2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Komunikasi informatika & Statistik lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi informatika & Statistik Kabupaten Enrekang ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan sektor Komunikasi informatika & Statistik di Kabupaten Enrekang / Renja.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi informatika & Statistik Kabupaten Enrekang 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah pembangunan di sektor Komunikasi informatika & Statistik, di Kabupaten Enrekang selama 5 tahun;
2. Menyiapkan tolok ukur sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggung jawabannya.
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja OPD yang berkelanjutan.
4. Membantu mencapai visi dan misi Komunikasi informatika & Statistik Kabupaten Enrekang .

1.4. Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, metode penyusunan, hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan , dan sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi informatika & Statistik Kabupaten Enrekang, susunan kepegawaian dan perlengkapan, aset yang dikelola, serta jenis pelayanan dan kelompok sasaran.

Bab III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi dan fungsi Dinas Komunikasi informatika & Statistik. Telahan Visi Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Telahan draft renstra, Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selanjutnya penentuan isu-isu strategis

Bab IV. Tujuan Dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Komunikasi informatika & Statistik, Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023. Pencapaian tujuan jangka menengah dan Sasaran jangka menengah.

Bab V. Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam periode 5 (lima) tahun dan tahunan, serta matriknya.

Bab VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif

Dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti pada program Dinas Komunikasi informatika & Statistik, Komunikasi informatika yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja Komunikasi informatika & Statistik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Memuat Program Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN ENREKANG

Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang memuat informasi tentang terbentuknya Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik yang telah dicapai melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang yang merupakan Salah satu Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Enrekang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi Informatika Dan Statistik.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas

Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang mempunyai Tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan dan mengendalikan seluruh tugas dan wewenang daerah dalam bidang Komunikasi Informatika Dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik mempunyai fungsi :

Kepala Dinas :

- (1) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik, mempunyai tugas memimpin Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang dalam hal melaksanakan urusan Komunikasi Informatika Dan Statistik dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik, mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan Dan Pembinaan Kesekretariatan Dinas;
 - b. Penyelenggaraan Dan Pembinaan Di Bidang Komunikasi Publik;
 - c. Penyelenggaraan Dan Pembinaan Di Bidang Informasi; Dan
 - d. Penyelenggaraan Dan Pembinaan Di Bidang Telematika;
 - e. Penyelenggaraan Dan Pembinaan Di Bidang Statistik;
 Uraian Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategi Dan Program Kerja Dinas Yang Sesuai Dengan Visi Misi Daerah;
- b. Menyelenggarakan Rencana Strategi Dan Program Kerja Dinas;
- c. Merumuskan Kebijakan Teknis Program Pengembangan Di Bidang Komunikasi Informatika Dan Statistik;
- d. Mengkoordinasikan Dengan Sekretariat Dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Dalam Pelaksanaan Tugas;
- e. Mengarahkan Pelaksanaan Rencana Strategis Kedalam Rencana Anggaran Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;
- f. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Unit Kerjanya;
- g. Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Di Dalam Pelaksanaan Tugas Di Bidang Informasi, Komunikasi Telematika Dan Statistik;

- h. Menerima Dan Menindak Lanjuti Data Dan Informasi Di Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;
- i. Merumuskan Dan Menetapkan Alternatif Pemecahan Masalah Dan Konsep Serta Naskah Dinas Hasil Kerja Bawahan;
- j. Menyampaikan Telaahan Staf Kepada Bupati Sesuai Dengan Bidang Tugasnya;
- k. Menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;
- l. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Organisasi Dinas Secara Berkala;
- m. Mengkoordinasikan Dengan Bidang-Bidang Dalam Penyusunan Laporan Secara Berkala Dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;
- n. Melakukan Penilaian Hasil Prestasi Kerja Dalam Dp-3;
- o. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Oleh Bupati.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan dan keuangan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Dan Penatausahaan Urusan Perencanaan Umum;
 - b. Penyelenggaraan Dan Penatausahaan Urusan Umum Dan Kepegawaian; Dan
 - c. Penyelenggaraan Dan Penatausahaan Urusan Keuangan.-

Uraian Tugas *Sekretaris* adalah sebagai berikut :

 - a. Menyusun Dan Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat ;
 - b. Menyusun Dan Menetapkan Rencana Anggaran Organisasi Sekretariat;
 - c. Mengkoordinasikan Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Organisasi Sekretariat Dengan Kepala Dinas Serta Para Kepala Bidang Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;
 - d. Membina Dan Mengkoordinasikan Unit-Unit Kerja Di Lingkup Sekretariat;
 - e. Mendistribusikan Tugas Kepada Sub Bagian Lingkup Sekretariat;
 - f. Membantu Kepala Dinas Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai Di Lingkup Sekretariat;

- g. Mengkompilasi Dan Mengakselerasi Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Organisasi Dari Masing-Masing Bidang Lingkup Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;
- h. Membantu Kepala Dinas Mengkompilasi, Mengakselerasi Dan Merumuskan Penetapan Kinerja Dari Bidang-Bidang Menjadi Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;
- i. Menghimpun Dan Mengelola Administrasi Data Dan Informasi Dinas;
- j. Menetapkan Pengalokasian Perlengkapan Dinas;
- k. Menata Tata Naskah Dan Ketatalaksanaan Dinas;
- l. Menyiapkan Bahan Koordinasi Dalam Melaksanakan Tugas Dinas Dan Memberikan Pelayanan Administratif Dan Fungsional Kepada Unsur Di Lingkungan Dinas Serta Menyiapkan Rencana Anggaran Biaya Operasional Dinas;
- m. Memberikan Saran Dan Pertimbangan Kepada Kepala Dinas Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;
- n. Mengadakan Pembinaan Dan Pengendalian Terhadap Tugas Setiap Sub Bagian Lingkup Sekretariat Dinas;
- o. Mengumpulkan Bahan Koordinasi Dalam Penyusunan Dan Pengendalian Program Kerja Dinas;
- p. Menghimpun, Mengolah, Menggandakan Dan Menyimpan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Dinas Secara Rapi;
- q. Menyiapkan Bahan Dan Data Dalam Rangka Pembinaan Teknis Fungsional Dan Penatausahaan;
- r. Menyelenggarakan Urusan Umum, Perencanaan, Perlengkapan, Keuangan, Kepegawaian, Surat Menyurat Dan Rumah Tangga Dinas;
- s. Menyiapkan Dan Mengkoordinasikan Urusan Anggaran Dinas Setiap Tahunnya Kepada Instansi Terkait;
- t. Membuat Dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas;
- u. Membuat Telaahan Staf Dan Pertimbangan Kepada Atasan;
- v. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat;
- w. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Organisasi Sekretariat Dinas Secara Berkala;
- x. Membantu Kepala Dinas Dalam Menyusun Laporan Secara Berkala Dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;

- y. Menyelenggarakan Perumusan Laporan Sekretariat Secara Berkala Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Dinas; Dan
- z. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Atasan.

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkajian, evaluasi dan pelaporan sesuai perencanaan Dinas.

Uraian Tugas *Sub Bagian Perencanaan* adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Sub Bagian Perencanaan;
- b. Menyiapkan Rancangan Rencana Anggaran Organisasi Sub Bagian Perencanaan;
- c. Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis Dan Rancangan Rencana Anggaran Organisasi Sub Bagian Serta Dokumen Penetapan Kinerja Bagian Dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- d. Membina Dan Mengkoordinir Tugas-Tugas Kerja Di Lingkup Sub Bagiannya;
- e. Membantu Kepala Dinas Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai Di lingkup Sub Bagiannya;
- f. Melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Organisasi Sub Bagian;
- g. Menghimpun Dan Mempelajari Peraturan Perundang Undangan, Kebijakan Teknis, Pedoman Dan Petunjuk Teknis Serta Bahan-Bahan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Perumusan Visi, Misi, Renstra Dan Renja Dinas;
- h. Mengkoordinasikan, Menghimpun Dan Memverifikasi Renstra Dan Renja Dari Masing-Masing Bidang;
- i. Mengumpulkan Mengolah Data Dan Informasi, Menginventarisasi Permasalahan Permasalahan Serta Melaksanakan Pemecahan Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Tugas-Tugas Perencanaan Dinas;
- j. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Koordinasi Instansi Vertikal Dan Perangkat Daerah Lainnya Dengan Dinas;
- k. Menghimpun, Mengklasifikasi Dan Menyusun Data Statistik Perencanaan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;
- l. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik;

- m. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Secara Berkala;
- n. Melakukan Penilaian Bawahan Dalam Rangka Pembinaan Karier; Dan
- o. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Dan Merumuskan Rancangan Rencana Strategis Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan Dan Merumuskan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. Mengkoordinasikan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Dengan Sekretaris Dinas Dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Kepala Sub Bagian Keuangan;
- d. Mengkoordinasikan Tugas-Tugas Kerja Dilingkup Sub Bagian;
- e. Menyiapkan Bahan Koordinasi Dalam Melaksanakan Tugas Dinas Dan Memberikan Pelayanan Administratif Dan Fungsional Kepada Unsur Di Lingkup Dinas;
- f. Memberikan Saran Dan Pertimbangan Kepada Sekretaris Dinas Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- g. Mengadakan Pembinaan Dan Pengendalian Terhadap Tugas Sub Bagian;
- h. Menghimpun, Mengolah, Menggandakan Dan Menyimpan Dokumen Laporan Kepegawaian, Inventaris Barang Dan Perlengkapan Serta Urusan Rumah Tangga Dinas Secara Rapi;
- i. Membantu Kepala Dinas Dalam Pengelolaan Urusan-Urusan Administrasi Barang Inventaris Dan Kepegawaian Dinas;
- j. Menghimpun Dan Mengkompilasi Dokumen Kepegawaian, Surat Menyurat Dan Inventaris Barang Dari Bidang Lingkup Diskominfo & Statistik.
- k. Menghimpun, Memverifikasi Dan Memelihara Dokumen Dan Informasi Kepegawaian, Surat Menyurat Dan Barang Inventaris, Serta Perpustakaan Dinas;

- l. Mengelola Administrasi Kepegawaian Dan Barang Inventaris Serta Perpustakaan Dinas;
- m. Membantu Kepala Dinas Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai Dilingkup Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- n. Menerima Dan Memproses Serta Mendistribusikan Surat, Dokumen Barang Inventaris Dan Kepegawaian;
- o. Mengadakan Dan Mendistribusikan Perlengkapan Rumah Tangga Dan Inventaris Barang Dinas;
- p. Melaksanakan Pengurusan Administrasi Perjalanan Dinas Dinas;
- q. Membuat Telaahan Staf Kepada Pimpinan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya;
- r. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Sub Bagian;
- s. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Organisasi Sub Bagian Secara Berkala;
- t. Membuat Laporan Secara Berkala Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- u. Melakukan Penilaian Kerja Bawahan Dan Rangka Pembinaan Karier; Dan
- v. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

Uraian Tugas *Kepala Sub Bagian Keuangan* adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan merumuskan rancangan Rencana Strategis Sub Bagian Keuangan ;
- b. menyiapkan dan merumuskan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Keuangan;
- c. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian dengan Sekretaris Dinas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan Tugas-Tugas Kerja Dilingkup Sub Bagian;
- e. Membantu Sekretaris Dalam Pengelolaan Urusan-Urusan Keuangan Dan Program Kegiatan Dinas;

- f. Membantu Sekretaris Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai Dilingkup Sub Bagian Keuangan;
- g. Menerima Dan Memproses Serta Mendistribusikan Surat Dan Dokumen Keuangan Dan Program Kegiatan Dinas;
- h. Melaksanakan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Keuangan;
- i. Melaksanakan Dan Mengkoordinasikan Perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- j. Menghimpun Dan Memverifikasi Terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Dinas;
- k. Melaksanakan Telaahan Staf Kepada Pimpinan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya;
- l. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Sub Bagian;
- m. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Organisasi Sub Bagian Secara Berkala;
- n. Membuat Laporan Secara Berkala Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- o. Melakukan Penilaian Kerja Bawahan Dalam Rangka Pembinaan Karier; Dan
- p. Melaksanakan Tugas-Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya.

Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang Komunikasi.

Uraian Tugas *Kepala Bidang Komunikasi* adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari Peraturan Perundang – Undangan Dan Ketentuan Lainnya Yang Relevan Untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas;
- b. Menyusun Rencana Kegiatan Bidang Komunikasi;
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Bidang Komunikasi;
- d. Mendelegasikan Tugas Kewenangan Kepada Kepala Seksi Di Bidang Komunikasi ;
- e. Melaksanakan Pembinaan Dan Pengendalian Terhadap Kegiatan Pelayanan Masyarakat Dan Hubungan Kelembagaan, Pos Dan Telekomunikasi Serta Kegiatan Telematika Tingkat Kabupaten;
- f. Memberikan Pedoman Dan Petunjuk Pelaksanaan Program Kegiatan Kepada Para Kepala Seksi Di Bidang Komunikasi;

- g. Menyelenggarakan Dan Mengkoordinasikan Pembentukan KKS (Kelompok Komunikasi Sosial) Seperti Kelompok Pencari, Pos Pelayanan Pedesaan, Pusat Informasi Pesantren, Persatuan Penjual Obat, LKSMD Dan Pembinaan Serta Pengembangannya;
- h. Memberikan Pelayanan Informasi Dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial;
- i. Menilai Prestasi Kerja Kepala Seksi Dan Staf Bidang Komunikasi;
- j. Memonitoring Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Di Bidang Komunikasi;
- k. Mengikuti Rapat Pertemuan , Seminar Dalam Rangka Menerima Dan Memberikan Informasi Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Komunikasi Di Tingkat Kabupaten;
- l. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Pimpinan; Dan
- m. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Relevan Dengan Tugas Dan Fungsinya Diberikan Oleh Atasan.

Bidang Informatika

- (1) *Bidang Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang*, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi, mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan dan penatausahaan pelayanan informasi publik; dan
 - b. penyelenggaraan dan penatausahaan media informasi

Uraian Tugas *Kepala Bidang Informatika* adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari Peraturan Perundang – Undangan Dan Ketentuan Lainnya Yang Relevan Untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas;
- b. Menyiapkan Bahan Penyusunan Program,Evaluasi Dan Pelaporan Pembinaan Dan Pengembangan Informasi Daerah;
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Informasi;
- d. Merumuskan Dan Menetapkan Kebijakan Teknis Operasional Bidang Informasi;
- e. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pembinaan /Pengembangan Kegiatan Informasi Tingkat Kabupaten;
- f. Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Menyangkut Pelaksanaan Tugas;

- g. Melakukan Pemantauan /Pengawasan Dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Informasi ;
- h. Melakukan Koordinasi Dan Pembinaan Terhadap Program Kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Publik, Dan Media Informasi;
- i. Mendelegasikan Tugas Dan Kewenangan Kepada Kepala Seksi Di Bidang Informasi ;
- J. Menilai Prestasi Kerja Staf Di Setiap Seksi Bidang Informasi Dalam Bentuk DP-3;
- K Memonitoring Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pada Bidang Informasi, Baik Yang Bersifat Insidentif Maupun Berkala;
- L. Mengikuti Rapat Pertemuan, Seminar Dalam Rangka Menerima Dan Memberi Informasi Yang Berhubungan Dengan Tugas Bidang Informasi;
- m. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Relevan Dengan Tugas Dan Fungsinya Yang Diberikan Oleh Atasan.

Bidang Telematika

- (1) Bidang Aplikasi Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Aplikasi Dan Telematika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Bidang Telematika mempunyai Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan infrastruktur aplikasi telematika, system informasi dan kemitraan telematika;
 - b. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur aplikasi telematika dan kemitraan Teknologi informasi;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal (2) Kepala Bidang Telematika mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan operasional kegiatan dengan anggaran pada bidang;
 - b. Melaksanakan hubungan komunikasi antar perangkat daerah;
 - c. Melaksanakan pelatihan, seminar dan bimbingan teknis telematika;

- d. Mengkoordinasikan peningkatan kompetensi telematika melalui partisipasi pada kegiatan telematika;
- e. Mengkoordinasikan kebijakan teknis telematika untuk keamanan informasi;
- f. Melaksanakan evaluasi tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah;
- g. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk pengembangan karir;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Statistik

- (1) Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengkoordinasikan Pengelolaan data, statistic, Evaluasi Dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Statistik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan data;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan data;
 - c. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan data;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan data; dan
 - e. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal (2) Kepala Bidang Statistik mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan operasional kegiatan dengan anggaran pada bidangnya
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerah,-
 - c. Melaksanakan hubungan kerja di bidang pemantauaah dan kinerja pembangunan daerah dan Pembangunan Sektoral,-
 - d. Mengkooordinasikan pelaksanaan program, lintas program, dan rencana kerja Pemerintah Daerah,-
 - e. Menyusun program kerja tahunan statistik sektoral pada bidangnya,-
 - f. Mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk keperluan survey,-

- g. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang sebagai bahan pengembangan karir,-
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dibidang Statistik kepada atasan,-
- b. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan Fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat :

- 1. Sub Bagian Perencanaan;
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Komunikasi Publik :

- 1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi;
- 2. Seksi sumber Daya komunikasi Publik dan hubungan kerja sama antar lembaga;

d. Bidang Informasi:

- 1. Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik;
- 2. Seksi Pengelolaan data & Integrasi Sistem Informasi;

e. Bidang Telematika :

- 1. Seksi Kajian Pengembangan Dan Pengendalian telematika;
- 2. Seksi Aplikasi Telematika;

f. Bidang Informasi:

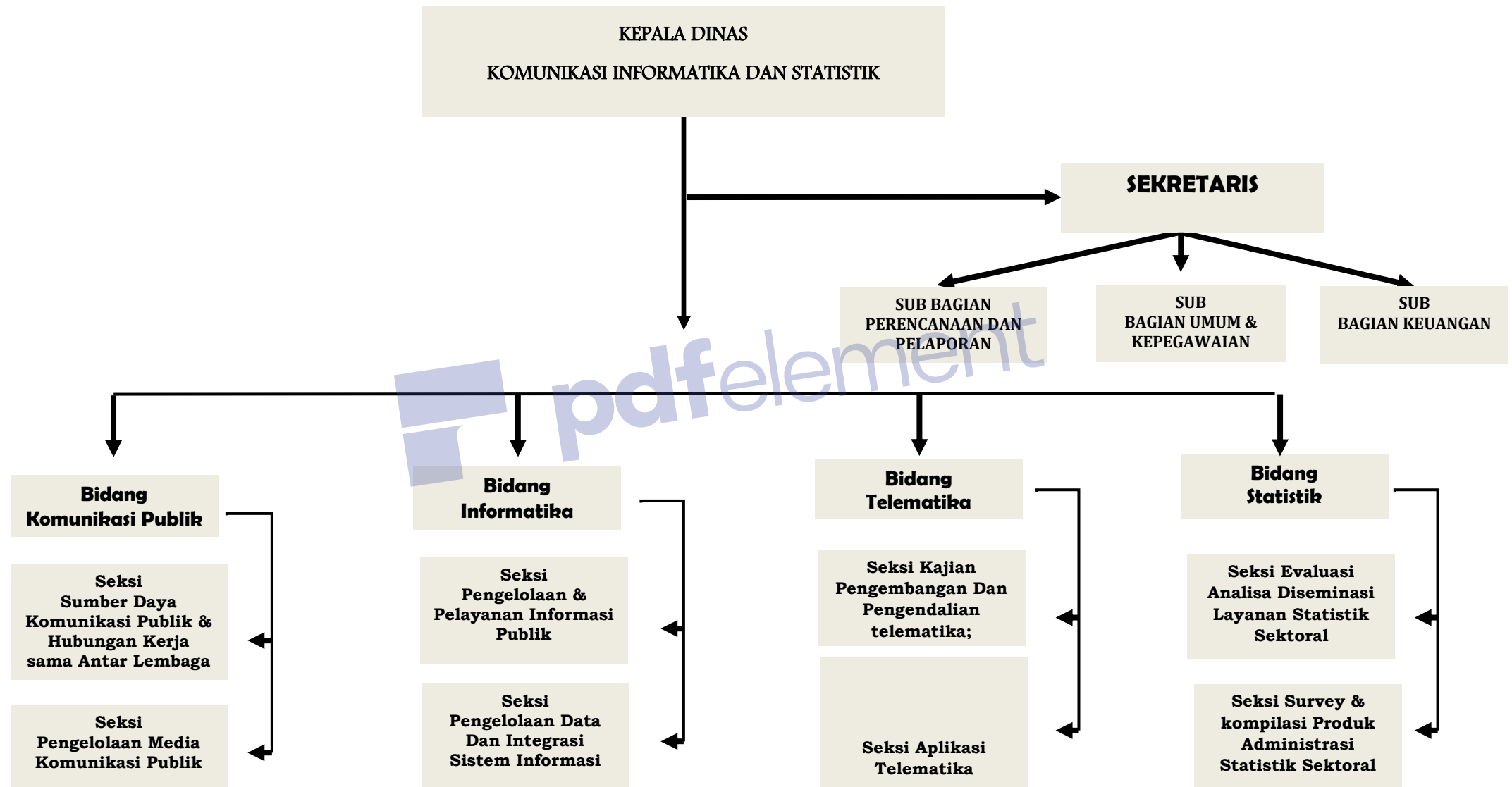
- 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
- 2. Seksi Media Informasi;

g. Bidang Statistik :

1. Seksi Evaluasi Analisa Diseminasi Layanan Statistik Sektoral;
2. Seksi Survey & kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral;



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN ENREKANG



2.2. SUMBER DAYA

Sumber daya memuat penjelasan ringkas tentang jenis macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang dalam menalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber Daya Manusia, asset yang dimanfaatkan untuk mencapai tugas dan fungsi Diskominfo & Statistik Kab. Enrekang.

2.2.1. *Sumber Daya Manusia*

Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang struktur organinasinya terdiri dari: Kepala Dinas pejabat eselon II.b), sekretaris pejabat eselon III.a, tiga kepala bidang pejabat eselon III.b, sepuluh kepala sub bagian dan kepala sub bidang (eselon IV.a). sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2.1, berikut ini.



Tabel 2.2.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

GOLON GAN / RUANG	SEKRE TA- RIAT		BIDANG INFORM ASI		BIDANG KOMUNIK ASI PUBLIK		BIDANG TELEMAT IKA		BIDANG STATIST IK		JUML AH		TOT AL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
II/d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III/c	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6
III/d	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	4	3	7
IV/a	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorer	1	2	6	1	-	1	-	1	-	1	7	6	13
	7	5	8	2	3	1	1	2	2	2			33

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian (Oktober, 2018)

Tabel.2.2.2 DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI DISKOMINFO & STATISTIK

PENDIDIK AN	SEKRETARI AT		BIDANG		BIDANG		BIDANG		BIDANG		TOT AL
			KOMUNIK ASI	INFORMA SI	TELEMATI KA	STATIST IK					
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5
MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
S1	1	5	2	1	4	2	-	2	2	1	20
S2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	6
	12		4		10		3		4		33

2.2.2 **Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang didukung sarana dan prasarana yang ada sebagaimana berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN
ENREKANG

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

TAHUN 2010 – 2018

NO. KODE LOKASI :
12.22.05.11.03.89.01.01

NO URT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	TOTAL
1	2	3	4	5	8
1	01	01	TANAH	-	-
2	02		PERALATAN DAN MESIN	-	799,479,969.20
		02	a. Alat-alat Besar	-	-
		03	b. Alat-alat Angkutan	-	207,431,000.00
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	-
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	-	359,578,040.63
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	-	232,470,928.57
		08	g. Alat-alat Kedokteran	-	-
		09	h. Alat-alat Laboratorium	-	-
		10	i. Alat-alat Keamanan	-	-
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	658,112,000.00
		11	a. Bangunan Gedung	-	658,112,000.00
		12	b. Bangunan Monumen	-	-
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	79,539,028.00
		13	a. Jalan dan Jembatan	-	-
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	-	-
		15	c. Instalasi	-	41,899,400.00
		16	d. Jaringan	-	37,639,628.00
5	05		ASET TETAP LAINNYA	-	-
		17	a. Buku Perpustakaan	-	-
		18	b. Barang Bercorak kesenian	-	-
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
6	06	20	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
			Jumlah	-	1,537,130,997.20

Enrekang, 31
Desember 2018

Tabel 2.2.2.1
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	
2	Kendaraan roda empat	
3	Kendaraan roda dua	
4	Mesin ketik	
5	Kalkulator	
6	Filing besi/metal	
7	Lemari arsip	
8	Berangkas	
9	Meja kerja ½ biro	
10	Meja kerja 1 biro	
11	Meja rapat	
12	Kursi rapat	
13	Kursi lipat	
14	AC split	
15	Lemari arsip kayu	
16	Kursi putar	
17	Papan tulis/white board	
18	Facsimili	
19	Printer	
21	Kursi kerja	
22	Kursi sofa	
23	Komputer PC	
25	Komputer server	
26	Laptop	
27	UPS	

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
28	Layar fokus	
29	Kamera digital	
30	Handycam	
31	Meja komputer	
32	Mouse	
33	Keyboard	
34	Hardisk	
36	Speaker	
37	Peralatan sound sistym	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Oktober, 2014)

2.3. KINERJA PELAYANAN

Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi diatas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melaksanakan Pemerintah Kabupaten Enrekang, pelaksanaannya dibuatkan dalam program dan kegiatan.

Lampiran

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan kondisi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang, dalam pencapaian target 5 (ima) tahun kedepan, perlu adanya identifikasi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang, adalah sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan.
2. Kualitas sumber daya manusia aparatur belum memadai.
3. Belum efektifnya Publik Relation atau peranan komunikasi dan informatika dalam membangun citra pemerintah daerah.
4. Topografi Kabupaten Enrekang yang sangat sulit terjangkau.
5. Adanya arus informasi yang semakin terbuka dan mengglobal dari semua aspek kehidupan masyarakat tanpa mengenal jarak dan waktu sehingga dapat bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Enrekang.
6. Kondisi SDM dan kultur budaya terhadap teknologi informasi masih terbatas.
7. Belum sinerginya antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam bidang layanan informasi.

2.4.2. Peluang

1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Kepres No. 101 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.
3. Adanya Instruksi Presiden RI No.06 Tahun 2001 tentang pengembangan dan penggunaan telematika di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang pers.
6. Adanya etos kerja yang tinggi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik.
7. Keinginan untuk memperkuat OPD Kominfo sebagai leading sector pemanfaatan TIK.

8. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik.
9. Ada keinginan untuk mencapai level yang lebih baik dalam pemanfaatan TIK.
10. Bupati saat ini ingin menerapkan sistem kontrol terhadap kinerja OPD melalui Command Center Dan Media Center.
11. Adanya iklim kerja yang cukup kondusif di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik.
12. Adanya berbagai kebijakan dan program pemerintah di bidang Komunikasi Informatika Dan Statistik.
13. Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya teknologi informasi untuk digunakan pada berbagai aspek.
14. Adanya kebutuhan proporsional Teknologi Informasi yang semakin besar dan dapat dilihat dengan adanya perkembangan Teknologi Industri yang cukup pesat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang dalam mencapai target 5 (lima) tahun ke depan, Identifikasi permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo, perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik dikemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Adalah Sebagai Berikut:

1. Sekretariat

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas;
2. Tidak adanya staf dengan latar belakang perencanaan;
3. Keterbatasan pengetahuan masyarakat dan *stakeholders* terkait tentang teknik, metode untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi skala prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

2. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika belum memadai untuk melayani seluruh wilayah Kab. Enrekang;
2. Masih adanya daerah/wilayah di Kab. Enrekang yang masih terisolasi dari Jaringan telekomunikasi.
3. Belum maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan KIM,
4. Terbatasnya kompetensi SDM Aparatur pada bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi;
5. Belum adanya data yang valid tentang daerah/lokasi menara telekomunikasi dan daerah yang memungkinkan mendirikan prasarana telekomunikasi /tower;
6. Belum adanya website khusus untuk Diskominfo & Statistik;
7. Pelayanan media center pemerintah daerah Kabupaten Enrekang belum maksimal;
8. Peralatan pelayanan mobil sound sistim belum memadai;
9. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD bidang informatika dan belum terintegrasinya data/dokumen pada satu Cental

Data.Tabel 3.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

3.2. Telaahan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Enrekang tahun 2008-2028 pada tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Keikutsertaan Bimtek Aparatur belum maksimal	Masih kurangnya sdm aparatur berkualifikasi teknis kominfo	Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas;
		Masih kurangnya sdm aparatur berkualifikasi teknis kominfo	Keterbatasan pengetahuan masyarakat dan <i>stakeholders</i> terkait tentang teknik, metode untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi skala prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan.
	Sistem Pengadaan Sarana TIK, belum terbarukan	Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika masih menggunakan teknologi lama	Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika belum memadai
	Transmisi signal memancarkan gelombang lurus tanpa penguatan	Kondisi geografis dan penyebaran penduduk yang tdk merata	Masih adanya daerah/wilayah di Kab. Enrekang yang masih terisolasi dari Jaringan telekomunikasi.
	Minat masyarakat akan teknologi informasi	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan IT	Belum maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan KIM,
		Belum maksimalnya koordinasi antara Pemda dengan Operator jaringan	Belum adanya data yang valid tentang daerah/lokasi menara telekomunikasi dan daerah yang memungkinkan mendirikan prasarana telekomunikasi /tower;
		Unit pelayanan Sound sistem masih terfokus di perkotaan	Peralatan pelayanan mobil sound sistim belum memadai;
		Belum maksimalnya pengembangan RITIK kabupaten	Belum optimalnya koordinasi antar SKPD bidang informatika dan belum terintegrasinya data/dokumen pada satu Central Data.

Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, serta merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan memperhatikan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 adalah:

**“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS)
yang Berkelanjutan dan Religius”**

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Enrekang Maju”, “Enrekang Aman”, “Enrekang Sejahtera”, serta “Enrekang yang Berkelanjutan” dan “Enrekang yang Religius”. Kelima pokok visi tersebut, dengan diawali pemaknaan “Enrekang” sebagai entitas dari suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Enrekang yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Enrekang” yang dicitakan dan diharapkan ke depan, sebagai berikut:

1. **Enrekang Maju**, dimaknai sebagai kondisi dimana Enrekang mencapai peningkatan perekonomian daerah, kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), ketersediaan infrastruktur yang memadai disertai dengan penerapan teknologi.
2. **Enrekang Aman**, mengandung makna Enrekang mencapai keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermutu.
3. **Enrekang Sejahtera**, dimaknai Enrekang dalam keadaan mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan mencukupinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.
4. **Enrekang yang Berkelanjutan**, mengandung makna pembangunan di Enrekang bersifat melanjutkan dan mengakselerasi prioritas dan kebijakan pembangunan daerah saat ini, sehingga tercipta Enrekang yang lebih maju,

lebih aman dan lebih sejahtera (EMAS) dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam.

- 5. Enrekang yang Religius**, mengandung dua makna pokok, yakni: (i) Enrekang diartikulasikan sebagai dimensi dari insan yang bertaqwa, yakni berperilaku taat dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kesadaran sendiri, baik dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga perilaku korupsi dan indiscipliner dalam menjalankan tugas dapat dihindari; (ii) Enrekang sebagai entitas masyarakat yang memiliki pengembangan kepribadian dan berkarakter teguh terhadap nilai-nilai agama, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu mengatasi persoalan dengan baik, bijak dan tegas.

Misi

Rumusan misi di dalam Renstra ini, didasarkan pada dokumen RPJMD yang dimaknai sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi rumusan tujuan dan sasaran. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan lima pokok visi tertentu yang relevan dan didukung pencapaiannya. Dengan demikian, rumusan misi ini sekaligus juga menderivasi rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan, hingga akhir periode pembangunan ini pada tahun 2023. Dirumuskan lima misi RPJMD Kabupaten Enrekang periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa;
3. Mengoptimalkan (mewujudkan) tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi;
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri;
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

Dalam hal ini Dinas komunikasi Informatika Dan Statistik Mengemban Misi 2(dua) yaitu Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa, Rumusan

misi tersebut, selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap pokok visi, dengan maksud untuk menunjukkan langkah-langkah nyata yang hendak dilakukan untuk mencapai impian dan kondisi ideal yang dikehendaki lima tahun ke depan, selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok Visi

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan public	Maju
2.	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa	Sejahtera, Religius
3.	Mengoptimalkan (mewujudkan) tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi	Aman
4.	Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri	Maju, Sejahtera
5.	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan	Maju, Sejahtera, Berkelanjutan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang Tahun 2019 – 2023 Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Enrekang yang berada pada daerah pengunungan , mutlak diperlukan rencana tata ruang. Penataan ruang perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga program dan kegiatan pembangunan Dinas KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK selaras dengan struktur dan pola tata ruang.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan Nomor 14 Tahun 2011 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini. RTRW Kabupaen Enrekang Tahun 2011-

2031 yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desintif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan Umum zonasi Kabupaten Enrekang Sebagai berikut:

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari permasalahan di atas dan telaah terhadap identifikasi permasalahan, maka isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan, intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerahkabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten/kota;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten/kota;
4. Masih adanya daerah/wilayah di Kabupaten Enrekang yang masih terisolasi dari jaringan telekomunikasi jaringan Internet (Blank Spot), sebagian di kecamatan Masalle, Maiwa dan kecamatan Enrekang sendiri.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

A. Isu Strategis Global Dan Nasional

1. Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu global yang sangat penting saat ini adalah *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG's) untuk jangka waktu 15 tahun ke depan (2016-2030). SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial,

partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's ini terdiri atas 17 sasaran dan 169 target pembangunan.

Di dalam Permendagri 86/2017 disebutkan secara tegas mengenai pentingnya mengintegrasikan SDG's ke dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa semua agenda-agenda SDG,s benar-benar terakomodir di dalam desain perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Terhitung sejak tahun 2015, negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang pada intinya tidak ada lagi hambatan terhadap arus barang dan jasa, manusia dan modal antara sesama negara ASEAN. Liberalisasi perdagangan ini akan berimbas pada meningkatnya intensitas persaingan di pasar domestik akibat membanjirnya produk-produk dari negara-negara ASEAN serta meningkatnya persaingan di pasar ekspor karena tidak adanya lagi restriksi dalam perdagangan internasional lingkup ASEAN. Kabupaten Enrekang tak terkecuali, akan menerima dampak atas kondisi ini dan karena itu perlu mengantisipasinya dengan meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, produktifitas, dan kemampuan berinovasi dari para pelaku ekonomi lokal.

3. Pemanasan Global (*Global Warning*)

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah dan upaya terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

4. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun SPM pada 6 (enam)

urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Untuk setiap jenis urusan, pemerintah daerah perlu menetapkan jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip SPM, agar pelayanan publik dapat lebih dioptimalkan.

5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah hampir dua dasawarsa terakhir, bukan hanya berimplikasi pada besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya, tetapi juga menuntut tumbuhnya potensi sumberdaya pembangunan daerah yang lebih mandiri dalam jangka panjang. Kemandirian pembangunan daerah dalam era desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya diperlukan untuk memperkuat pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumber daya alam secara maksimal dalam rangka pemerataan, keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat NKRI. Salah satu implikasi penting dari desentralisasi dan otonomi daerah, menuju kemandirian pembangunan setiap daerah adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, menuntut aparat pemerintah daerah yang profesional disertai pelayanan publik yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik lokal maupun asing. Investasi diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menekan jumlah pengangguran, tetapi juga untuk mendorong tumbuhnya para wirausaha lokal.

7. Pembangunan Sektor Unggulan

Pembangunan sektor unggulan oleh pemerintah pusat dimaksudkan agar pembangunan nasional bisa lebih fokus pada sektor yang dapat memberikan dampak yang luas terhadap pembangunan sektor lainnya. Sasaran pembangunan sektor unggulan, mencakup: (a) kedaulatan pangan, meliputi produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi; (b) kedaulatan energi; (c) maritim dan kelautan, meliputi memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; (d) pariwisata dan industri manufaktur; (e) ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, meliputi ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, serta lingkungan. Prioritas nasional ini sangat relevan dengan konteks Kabupaten Enrekang yang

perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor unggulan.

8. Pemerataan Pembangunan Antar dan Intra Wilayah

Sejauh yang bisa diamati dari kebijakan pemerintah pusat, ada keinginan kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan/daerah. Upaya ini akan mewarnai pelaksanaan pembangunan nasional dalam lima tahun terakhir. Sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai, mencakup: (a) menurunnya kesenjangan antar kelompok ekonomi; (b) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif, meliputi perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan kurang mampu, pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu, peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, dan meningkatnya kualitas dan keterampilan pekerja. Sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah, mencakup: (a) pemerataan pembangunan antar wilayah, meliputi peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Luar Jawa, dan pembangunan kawasan perkotaan. Kondisi Kabupaten Enrekang yang masih menunjukkan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dapat memperoleh manfaat dari kebijakan nasional ini.

B. Isu Regional Sulawesi

1. Interkonektivitas Wilayah

Integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian KBI dan KTI. Sebagai pintu gerbang Sulawesi Selatan dalam jalur transportasi Trans Sulawesi, Kabupaten Enrekang merupakan daerah yang sangat strategis dalam arus mobilisasi barang dan manusia antar provinsi di Sulawesi. Posisi strategis ini harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

2. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah sangat penting dilaksanakan.

C. Isu Provinsi Sulawesi Selatan

Beberapa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang teridentifikasi di dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023, antara lain :

1. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis;
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Ketimpangan distribusi pendapatan dan ketimpangan wilayah;
5. Penanggulangan kemiskinan;
6. Pengangguran;
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
8. Pengembangan industri;
9. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
10. Keamanan dan ketertiban;
11. Ketahanan energi (energi baru terbarukan);
12. Pengembangan perdesaan.

D. Isu Kabupaten Enrekang

Isu-isu strategis Kabupaten Enrekang diidentifikasi berdasarkan permasalahan serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Enrekang ke depan, serta mengakomodir berbagai isu strategis pembangunan regional maupun nasional. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang perlu memperhatikan isu dan permasalahan yang menjadi penekanan pemerintah pusat dan provinsi pada periode pembangunan yang tengah berlangsung agar program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan nantinya dapat selaras dan terintegrasi dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

1. Penanggulangan Kemiskinan

Sampai saat ini di Kabupaten Enrekang masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Enrekang. Hingga tahun 2017, sebaran penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Selatan masih berada di beberapa kabupaten/kota, termasuk di

Kabupaten Enrekang. Kondisi ini mengharuskan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan harus disinkronisasikan antar tingkatan pemerintahan, antar sektor, dan antar pelaku pembangunan agar efektif menanggulangi kemiskinan.

2. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan

Masalah kesehatan yang semakin kompleks dengan bertambahnya isu nasional kasus stunting dan gizi buruk sehingga dibutuhkan inovasi khusus untuk mengintervensi kasus tersebut. Inovasi tersebut dilakukan agar dapat terdeteksi dari awal penduduk yang mengalami permasalahan kesehatan.

3. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan

Rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Enrekang antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan. Pemerataan pendidikan juga sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik.

4. Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik dan air bersih di Kabupaten Enrekang masih belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan secara optimal baik sisi kuantitas maupun kualitasnya. Masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah. Oleh karena itu isu pemerataan pembangunan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat, penerapan pengelolaan jaringan irigasi, partisipasi di masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) di daerah-daerah terisolir/terpencil juga sangat perlu dilaksanakan guna membuka akses transportasi dan arus ekonomi antar desa.

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Enrekang belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara memadai. Karena itu pengembangan potensi perekonomian rakyat baik pada sektor pertanian sebagai sektor basis maupun sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal perlu terus ditingkatkan. Selain itu peran UMKM, industri kecil/rumah tangga, dan koperasi perlu didorong guna memberikan kontribusi yang nyata bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Orientasi perbesaran skala ekonomi dan peningkatan produktivitas harus menjadi isu pokok agar daya saing atas potensi-potensi di Kabupaten Enrekang bisa meningkat.

Pelatihan ketrampilan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran.

6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Seiring dengan perkembangan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Enrekang, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Selain penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparat juga menjadi sebuah keharusan untuk menjamin peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga semakin kompleks.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun.

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang.

Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai guna mewujudkan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan informasi yang lancar dan benar kepada masyarakat menuju terbentuknya masyarakat informatif, adalah mewujudkan pelayanan Media Center, Pelayanan Internet keliling, pelayanan sound system dan kerjasama media dengan pemda melalui pemuatan rubrik, Press Realise, Dan TV Kabel kegiatan pemda dan media lokal lainnya, dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi.
- b. Terciptanya kegiatan penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sehingga menghasilkan sebuah layanan prima sesuai dengan visi pembangunan Kab. Enrekang.
- c. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- d. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan data/dokumen dan informasi elektronik dalam rangka membuka akses informasi dan layanan Pemerintah Kab. Enrekang yang transparan.
- e. Perbaiki organisasi, sistem manajemen, budgeting dan proses kerja pemerintahan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu satu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Adapun Sasaran rencana strategis untuk mewujudkan tujuan diatas, tahun 2019-2023 adalah:

- a. Terdapat tiga sasaran untuk mewujudkan *tujuan pertama, Mewujudkan aparatur Diskominfo-Statistik yang profesional, bersih, dan beretos kerja tinggi*. Sasaran tersebut adalah:
 1. Terwujudnya aparatur Diskominfo Statistik yang profesional;
 2. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan SKPD;
 3. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku;
 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Untuk mewujudkan *tujuan kedua, Meningkatkan pelayanan Informasi Dan Komunikasi Publik yang mampu menjangkau masyarakat dalam wilayah Kabupaten Enrekang, memantapkan perencanaan program dan kegiatan bidang dengan menganut perencanaan partisipatif dan berkeadilan*, terdapat enam sasaran yaitu:
 1. Belum Adanya Dokumen Ritik / Pengembangan Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Diskominfo Statistik;
 2. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai;
 3. Melaksanakan forum Kelompok Informasi komunikasi Di Kecamatan Dan desa;
- c. Untuk mewujudkan *tujuan ketiga, Peningkatkan pelayanan informasi komunikasi, kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan memantapkan perencanaan program dan kegiatan bidang Infokom dengan menganut perencanaan partisipatif dan berkeadilan*, terdapat 3(tiga) sasaran yaitu:
 1. Tersedianya sarana media untuk akses informasi yang memadai;

- 2. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan KIM;
- 3. Meningkatnya SDM Aparatur informatika;

Tabel.T-C.25

Tujuan Dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan aparatur Diskominfo-Statistik yang profesional, bersih, dan beretos kerja tinggi.	1. Terwujudnya aparatur Diskominfo Statistik Kab.Enrekang yang profesional;	Persentase peningkatan sdm aparatur Diskominfo & Statistik					
		2. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan OPD	Persentase peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah					
		3. Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku;	Persentase peningkatan ...					
		4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	Jumlah sarana dan prasarana...					
2.	Meningkatnya pelayanan Informasi Dan Komunikasi Publik mampu menjangkau masyarakat dalam wilayah Kabupaten Enrekang	4. Tidak Adanya Dokumen Ritik / Pengembangan Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Diskominfo Statistik.	Tersusunnya dokumen RITIK					
		2. Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai	Tidak tersedianya sarana informasi komunikasi					
		3. Terlaksananya forum Kelompok Informasi komunikasi Di Kecamatan Dan desa.						
3.	Peningkatkan pelayanan informasi komunikasi, kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan memantapkan perencanaan program dan kegiatan bidang Infokom dengan menganut perencanaan partisipatif dan berkeadilan,	1. Tersedianya sarana media akses informasi yang memadai;						
		2. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan KIM;						
		3. Meningkatnya SDM Aparatur informatika;						

Tabel 6.1. rpjmd

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Diskominfo & Statistik		
Visi: Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi-2: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa		
2.3. Meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat	2.3.1. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Peningkatan kesadaran literasi masyarakat
2.4. Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan	2.4.1. Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan	berbasis teknologi informasi



PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2018)	Target Tahun			
			2019	2020	2021	
BIDANG KOMUNIKASI						
BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK						
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN MENDORONG INOVASI						
INDIKATOR 9.c.1* : Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.						
PROGRAM 1: Program Peningkatan Akses dan kualitas informasi komunikasi publik						
Kegiatan 1 : Pemantauan dan pengawasan menara telekomunikasi (Tower BTS)	Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan menara telekomunikasi	Dok/Laporan	71	75	77	79
Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Pemantfaatan saluran komunikasi publik melalui MC	Terwujudnya saluran komunikasi publik	Kegiatan	-	1	1	1
Kegiatan 3 : Literasi Media Sosial	Jumlah peserta yang mengikuti Literasi Media	Orang	-	-	150	150
Kegiatan 4 : Pengelolaan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat	Jumlah isupublik, pendapat umum dan aduan, masyarakat yang dikelola	Layanan	-	3	3	3
Kegiatan 5 : Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan komunikasi public	Adanya laporan Monev	Laporan	-	2	2	2
Kegiatan 6 : Gelar aksi pertunjukan rakyat	Tercapainya penyampaian informasi pada masyarakat	Kegiatan	-	1	1	2
INDIKATOR 9.c.1.(a) : Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.						

PROGRAM 1: Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa						
Kegiatan 1: Pengembangan press relese kegiatan pemda	Terpublikasinya kegiatan Pemda	Dokumen	50	50	50	50
Kegiatan 2 : Pelaksanaan publikasi, dokumentasi dan kemitraan media	Adanya Dokumen dan jumlah kerjasama media	Media	5	12	12	12
Kegiatan 3 : Pelaksanaan jumpa pers pemda	Jumlah jumpa pers yang dilaksanakan	Kali	0	2	2	2
Kegiatan 4 : Tour jurnalistik kegiatan pemda dan mayarakat	Adanya sinergitas media, masyarakat dan pemda	Kegiatan	-	1	1	1
Kegiatan 5 : Pelaksanan Pelatihan jurnalistik OPD dan Masyarakat	Jumlah OPD/ Masyarkat yang mengikuti pelatihan jurnalistik	Orang/OPD	-	43	43	43

TARGET DAN INDIKATOR SDGs (Sustainable Development Goals) / (TPB) Tujuan Pembangu

TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORO

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar TPB (3)	Targe	
			2019	2020

Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	0.59	65	67.5
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	0.59	65	67.5
	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.59	65	67.5

TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUN Keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar TPB (3)	2019
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	-	40% dari jumlah PPID Pembinaan

TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GI

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar TPB (3)	
			2019
Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	70.00	71.00
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	50%	60%
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	-	71.00

Tabel.T-C.25

Tujuan Dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

MISI	No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		
	1	2	3	4		20
MISI 2, MENINGKATN YA KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING PENGUASAAN TEKNOLOGI BERMORAL SERTA BERIMAN DAN BERTAQWA		BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK				
	1	TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI		INDIKATOR 9.c.1* : Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		
		PROGRAM 1: Program Peningkatan Akses dan kualitas informasi komunikasi publik				
		Kegiatan 1 : Pemantauan dan pengawasan menara telekomunikasi (Tower BTS)	Menara telekomunikasi (BTS) di Kab.Enrekang	Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan menara telekomunikasi	Dok/ Lapor an	
		Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Pemanfaatan saluran komunikasi publik melalui MC	Mengelola dan memanfaatkan saluran komunikasi publik melalui Media center	Terwujudnya saluran komunikasi publik	Kegiat an	
		Kegiatan 3 : Literasi Media Sosial	Terlaksananya kegiatan literasi informasi publik	Jumlah peserta yang mengikuti Literasi Media	Orang	
		Kegiatan 4 : Pengelolaan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat	terwujudnya pengelolaan isu publik, pendapat dan aduan masyarakat terkait TIK	Jumlah isupublik, pendapat umum dan aduan, masyarakat yang dikelola	Layan an	

	Kegiatan 5 : Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan komunikasi publik	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan komunikasi public	Adanya laporan Monev	Laporan	
	Kegiatan 6 : Gelar aksi pertunjukan rakyat	Terlaksananya gelar aksi pertunjukan rakyat	Tercapainya penyampaian informasi pada masyarakat	Kegiatan	
	PROGRAM 1: Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa		INDIKATOR 9.c.1.(a) : Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.		
	Kegiatan 1: Pengembangan press relese kegiatan pemda	Meningkatnya pengembangan Press Realise kegiatan Pemda	Terpublikasinya kegiatan Pemda	Dokumen	
	Kegiatan 2 : Pelaksanaan publikasi, dokumentasi dan kemitraan media	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi kemitraan media	Adanya Dokumen dan jumlah kerjasama media	Media	
	Kegiatan 3 : Pelaksanaan jumpa pers pemda	Terlaksananya Jumpa Perss Pemda	Jumlah jumpa pers yang dilaksanakan	Kali	
	Kegiatan 4 : Tour jurnalistik kegiatan pemda dan masyarakat	Terlaksananya Tour Jurnalistik OPD dan Masyarakat	Adanya sinergitas media, masyarakat dan pemda	Kegiatan	
	Kegiatan 5 : Pelaksanaan Pelatihan jurnalistik OPD dan Masyarakat	Terlaksananya pelatihan jurnalistik OPD dan Masyarakat	Jumlah OPD/ Masyarakat yang mengikuti pelatihan jurnalistik	Orang /OPD	
	BIDANG TELEMATIKA				
	PROGRAM 1: Program Pengembangan Telematika E-Government		INDIKATOR 9.c.1 (b) : Proporsi individu yang menggunakan internet		
	Kegiatan 1 : Pengembangan Jaringan Dan Aplikasi Untuk Pelaksanaan e-Government berbasis TI	Terwujudnya Jaringan dan aplikasi untuk pelaksanaan e-government berbasis Teknologi	Presentase akses jaringan internet dan aplikasi guna mewujudkan pelaksanaan E-Government	%	

		informasi			
	Kegiatan 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Teknologi Informasi	Terwujudnya Sumber daya manusia pengelola teknologi informasi (IT)	Meningkatnya Jumlah Pengelola IT/Admin Aplikasi/Website OPD/Kelurahan/Desa Setiap Tahun	Orang	
	Kegiatan 3 : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Adanya sarana dan prasarana Teknologi komunikasi informasi	Terjalannya komunikasi antara OPD dan lembaga lainnya dalam rangka peelaksanaan e- government	%	
	Kegiatan 4 : Operasional Web Site / Aplikasi Pelaksanaan E - Goverment berbasis Teknologi Internet	Terwujudnya pemerataan informasi daerah melalui website yang berbasis IT	Tersebar nya informasi daerah melalui web site Kabupaten dan Website Diskominfo	%	
	Kegiatan 5 : Maintenance infrastruktur Telematika	Adanya koneksitas dan jaringan yang handal	Tersedianya konektisitas dan jaringan yang handal	%	
	Kegiatan 6 : Operasional Pengadaan/Pemasang an Wifi Gratis pada pusat kegiatan masyarakat	Adanya wifi gratis bagi masyarakat Informasi & komunikatif	Tersedianya wifi gratis bagi masyarakat	Titik per tahun	
	Kegiatan 7 : Sosialisasi Internet Sehat pada peserta didik	terlaksananya internet sehat bagi peserta didik OPD dan siswa	Jumlah Peserta didik yang mengikuti sosialisasi	orang	
	TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN				
	BIDANG INFORMATIKA				

	PROGRAM 1: Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi		INDIKATOR 16.10.2 (c): Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan		
	Kegiatan 1: Operasional Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	terwujudnya PLID untuk Badsan Publik (OPD/Inst.Vertikal), masyarakat dan LSM	Presentase jumlah informasi publik dan dokumentasi publik yang dikelola oleh PPID melalui Website Pemerintah.	%	
	Kegiatan 2: Operasional Media Center Pemkab Enrekang	Tercapainya fungsi Media Center bagi ASN, non ASN, anak sekolah dan masyarakat	Adanya Pemberitaan Kegiatan Pemda Melalui Media Center	Berita per Tahun	
	Kegiatan 3: Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Instansi Pemerintah, swasta organisasi dan masyarakat	2.1.Terbinanya Kelompok Informasi masyarakat	KIM per Tahun	
	Kegiatan 4: Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Adanya partisipasi aktif Masyarakat Informasi di tiap kecamatan dan kelurahan	2.2.Terbentuknya pengurus KIM di Desa/kelurahan	KIM	
	Kegiatan 5: Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Pembangunan	Terlaksananya Pameran/ekspo oleh Instansi Pemerintah, swasta, organisasi dan masyarakat	Ikut sertanya Pemda Enrekang dalam Pameran Pembangunan	kali per tahun	
	Kegiatan 6: Pembuatan Buletin Majallah Suara Massenrempulu		Terbitnya majallah suarah massenrempul	Eksa mpler /per Tahun	
	Kegiatan 7 : Pembinaan Pelaku Uasaha Penyiaran (TV Kabel)		Terbinanya Pelaku Usaha Penyiaran dan terpublikasinya kegiatan pemda melalui	Pelaku Usaha	

			media TV Kabel		
	Kegiatan 8 : Penayangan kegiatan pemda melalui Penyiaran TV Kabel		Jumlah Kegiatan pemda yang disiarkan melalui TV Kabel	Siara n	
	Kegiatan 9 : Pengelolaan Data Informasi melalui aplikasi sistem integrasi		Terkelolaanya data informasi publik kedalam integrasi sistem informasi	jumla h data	
	Kegiatan 10 : Operasional pelayan sound Sistim	Badan Publik, (OPD/Inst.Vertikal), organisasi masyarakat dan LSM	Adanya palayanan sound sistem	Tahu n	
	Kegiatan 11 : Pengadaan / Pemeliharaan peralatan sound Sistim pada Diskominfo-Statistik	Peralatan sound sistem dapat dimanfaatkan dan berfungsi dengan baik	Tersedianya peralatan dan terpeliharanya sound sistem	Paket	
	BIDANG STATISTIK				
	TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
	PROGRAM 1: Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah		INDIKATOR 17.18.1.(b) : Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.		
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan pengumpulan data PDRB		Tersedianya data PDRB	Buku	
	Kegiatan 2 : Penyusunan Profil Kabupaten Enrekang		Tersusunnya profil kabupaten	Buku	

	Kegiatan 3 : Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka		Tersedianya data Enrekang dalam angka dan kecamatan dalam angka	Buku	4
	PROGRAM 2: Program Pengembangan data/informasi/sta tistik daerah		INDIKATOR 17.18.1.(c) : Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)		
	Kegiatan 1 : Kajian dan Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral		Tersusunnya metadata Kab. Enrekang	Buku	
	Kegiatan 2 : Penyusunan buku tentang indeks harga konsumen dan inflasi Kab. Enrekang		Tersusunnya buku indeks harga konsumen dan inflasi Kab. Enrekang	Buku	
	Kegiatan 3 : Penyusunan Data Base Diskominfo- Statistik		Tersusunnya Data Base Diskominfo Statistik	Buku	

(sumber data
Bidang Teknis
Diskominfo,
Januari 2019)

BAB. V

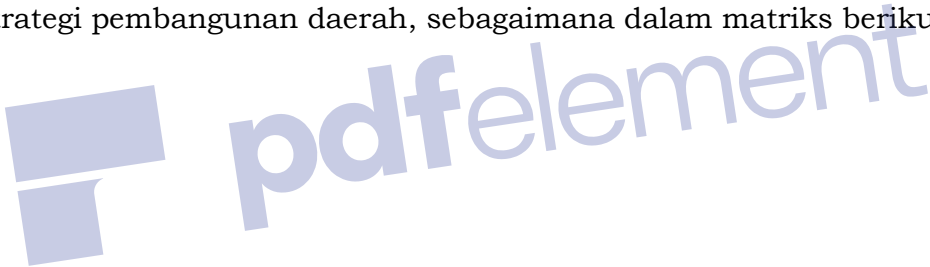
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD serta tantangan dan peluang dalam mencapai target 5 (lima) tahun ke depan, Identifikasi permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo, perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik dikemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

5.1. Strategi Perangkat Daerah Diskominfo & Statistik

Setelah disajikan tujuan dan sasaran, selanjutnya disajikan strategi pembangunan daerah yang merupakan bagian yang menyajikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah dan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Permendagri No. 86 tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kabupaten Enrekang selama periode 2018-2023, selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan daerah, sebagaimana dalam matriks berikut ini :



Tabel

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi: Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi-2: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa		
2.4. Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan	2.4.1. Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan	Peningkatan kesadaran literasi masyarakat berbasis teknologi informasi

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang untuk lima tahun yang akan datang. Permendagri No. 86 tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selengkapnya arah kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Enrekang untuk lima tahun yang akan datang, adalah sebagai berikut:

Hubungan antara Arah Kebijakan Pemda Dengan Tupoksi Diskominfo & Statistik :

1. Arah Kebijakan Tahun 2019.

Tahun 2019 pada dasarnya merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program – program tahun sebelumnya. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019, meliputi:

- a. Pembangunan SDM berkualitas dan penguatan penanaman nilai – nilai religiusitas;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan public;
- c. Penguatan dan peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Arah Kebijakan Tahun 2020.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;

3. Arah Kebijakan Tahun 2020.

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah sentra – sentra produksi pertanian dan daerah yang masih terisolir;
- b. Peningkatan fungsi dan kualitas infrastruktur pertanian dan sarana produksi pertanian;

- c. Penguatan pembangunan sektor – sektor ekonomi produktif berbasis keunggulan lokal daerah;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat;
- f. Memperluas dan memperkuat fungsi koordinasi dan peran organisasi keagamaan dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengamalan nilai – nilai keagamaan;
- g. Pendayagunaan teknologi dan Teknologi tepat guna bagi pelaku usaha tani dan KUMKM;
- h. Melanjutkan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan daerah;
- i. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada **penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi**;

4. Arah Kebijakan Tahun 2021.

- a. Pengembangan dan perluasan sector – sector ekonomi produktif dan unggulan daerah melalui pengembangan infrastruktur wilayah sentra – sentra produksi pertanian;
- b. Peningkatan produktivitas pertanian berbasis keunggulan local untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat;
- c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan layanan jaminan kesehatan yang memadai;
- d. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat disertai jaminan akses dan mutu pelayanan pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman disertai dengan daya dukung sarana prasarana dasar yang memadai;
- f. Peningkatan nilai – nilai religiusitas disertai dengan implementasi dalam kehidupan social masyarakat untuk memperkuat karakter masyarakat yang berbudaya dan berkinerja;
- g. Melanjutkan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan daerah;
- h. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan **menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik** dan reformasi birokrasi;

- i. Arah Kebijakan Tahun 2022.
 - a. Pengembangan dan perluasan sector – sector ekonomi produktif dan unggulan daerah melalui pengembangan infrastruktur wilayah sentra – sentra produksi pertanian;
 - b. Peningkatan produktivitas pertanian berbasis keunggulan local untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat;
 - c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat disertai perluasan layanan jaminan kesehatan;
 - d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagai pondasi kuat pembangunan sumber daya manusia;
 - e. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan permukiman;
 - f. Pemantapan nilai – nilai religiusitas disertai dengan implementasi dalam kehidupan social masyarakat untuk memperkuat karakter masyarakat yang berbudaya dan berkinerja;
- j. Arah Kebijakan Tahun 2023.
 - a. Penguatan sector – sector ekonomi produktif dan unggulan daerah sebagai pondasi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi;
 - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat disertai perluasan layanan jaminan kesehatan yang berkelanjutan;
 - c. Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagai pondasi kuat pembangunan sumber daya manusia;
 - d. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
 - e. Pemantapan kehidupan masyarakat yang berbudaya berlandaskan nilai – nilai religiusitas.

Meskipun masing – masing tahapan mendukung tercapainya tujuan tertentu, namun bukan berarti tujuan tersebut diupayakan dan dituntaskan pada tahap yang bersangkutan, namun hal ini hanya merupakan pemusatan perhatian atau arah. Masing – masing upaya pada setiaptahapan merupakan satu kesatuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi dalam kurun waktu 2019 - 2023.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Selanjutnya, dirumuskan Program Pembangunan Daerah sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2019-2023 yang akan datang. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Artinya, program pembangunan daerah merupakan upaya yang hendak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan prioritas dan sasaran.

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai focus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 – 2023, yang dijabarkan berdasarkan misi, adalah sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan publik.

Program pembangunan yang mendukung pencapaian misi ini adalah:

- 1.1. Program rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- 1.2. Program pembangunan jalan dan jembatan;
- 1.3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 1.4. Program pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan;
- 1.5. Program pengembangan dan pengelolaan system irigasi partisipatif;
- 1.6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya;
- 1.7. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- 1.8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- 1.9. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- 1.10. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- 1.11. Program pembnaan, pengawasan, dan pengembangan ketenagalistrikan;

- 1.12. Program pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan energy baru terbarukan.

2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral, beriman, dan bertaqwa.

Program pembangunan daerah yang mendukung misi ini adalah:

- 2.1. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- 2.2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2.3. Program pengembangan lingkungan sehat;
- 2.4. Program perbaikan gizi masyarakat;
- 2.5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- 2.6. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
- 2.7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- 2.8. Program upaya kesehatan masyarakat;
- 2.9. Program obat dan perbekalan kesehatan;
- 2.10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 2.11. Program standarisasi pelayanan kesehatan;
- 2.12. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- 2.13. Program pendidikan anak usia dini;
- 2.14. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun;
- 2.15. Program penilaian mutu/kemampuan anak didik;
- 2.16. Program pendidikan non formal;
- 2.17. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2.18. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perpustakaan;
- 2.19. Program pengembangan budaya dan gemar membaca;
- 2.20. Program manajemen pelayanan pendidikan;
- 2.21. Program pengelolaan perpustakaan berbasis IT;
- 2.22. Program pengembangan dan pemanfaatan SDA dan teknologi tepat guna;
- 2.23. Program pengembangan data dan informasi;
- 2.24. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- 2.25. Program fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan pendidikan keagamaan;
- 2.26. Program peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai religiusitas

3. Mengoptimalkan/mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.

Program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian misi ini adalah:

- 3.1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 3.2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
- 3.3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 3.4. Program mengintensifkan pangangan pengaduan masyarakat;
- 3.5. Program peningkatan pengelolaan administrasi dan kelembagaan pemerintah daerah;
- 3.6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan;
- 3.7. Program penataan peraturan perundang-undangan;
- 3.8. Program penataan administrasi kependudukan;
- 3.9. Program pembinaan administrasi serta penataan pemerintahan dan wilayah administrasi desakelurahan;;
- 3.10. Program perencanaan pembangunan daerah;
- 3.11. Program pengembangan kelembagaan masyarakat di perdesaan dan kelurahan;
- 3.12. Program pengembangan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- 3.13. Program perencanaan tata ruang;
- 3.14. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- 3.15. Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 3.16. Program Tanggap darurat dan logistic bencana;
- 3.17. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- 3.18. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

4. Meningkatkan skala usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustry.

Program pembangunan daerah yang mendukung misi ini adalah:

- 4.1. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;
- 4.2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- 4.3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
- 4.4. Program pelayanan perizinan terpadu;
- 4.5. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
- 4.6. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan social lainnya;
- 4.7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan;
- 4.8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- 4.9. Program peningkatan kinerja pengelolaan STA;
- 4.10. Program pengembangan kawasan agropolitas belajen;
- 4.11. Program pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;
- 4.12. Program peningkatan kesejahteraan petani;
- 4.13. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- 4.14. Program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM;
- 4.15. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
- 4.16. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- 4.17. Program pengembangan industry kecil dan menengah;
- 4.18. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- 4.19. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- 4.20. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- 4.21. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
- 4.22. Program pengembangan budidaya perikanan;
- 4.23. Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- 4.24. Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan;

5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

Program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian misi ini adalah:

- 5.1. Program pengembangan destinasi wisata;

- 5.2. Program pengembangan kemitraan pariwisata;
- 5.3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;;
- 5.4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- 5.5. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
- 5.6. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 5.7. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 5.8. Program system pertanian organik;
- 5.9. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- 5.10. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- 5.11. Program rehabilitasi hutan dan lahan;
- 5.12. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
- 5.13. Program pembinaan dan penertiban industry hasil hutan;
- 5.14. Program peningkatan fungsi kebun raya.

Strategi Nasional Komunikasi Informatika Dan Statistik

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
3. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD serta tantangan dan peluang dalam mencapai target 5 (lima) tahun ke depan, Identifikasi permasalahan dan kendala didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo, perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dikemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan / kelemahan dan peluang / ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Komunikasi Informasi Telematika Dan Statistik di Kabupaten Enrekang selama lima tahun mendatang (2019-2023), yaitu:

1. Pengembangan sarana dan prasarana Diskominfo Dan Statistik Pembuatan Jaringan Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kab. Enrekang (RITIK);
2. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Diskominfo Dan Statistik melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
3. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur

pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran, Tujuan, Misi, Dan Visi Organisasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten

Enrekang adalah:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan fasilitas Teknologi Informatika dan Komunikasi,
2. Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi.
3. Pelaksanaan kinerja Dinas Kominfo Dan Statistik perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
4. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Diskominfo Dan Statistik, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang.
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas komunikasi Informatika Dan Statistik;
9. Mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur telematika dalam rangka meningkatkan kemampuan, mengumpulkan, Mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk keperluan Pemerintah dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
10. Mengembangkan Upaya Terselenggaranya Tata Pemerintahan Yang Berbasis Elektronik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Secara Bertahap Dan Berkelanjutan Sebagai Wujud Implementasi *E-Government*;
11. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan **aplikasi** berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
12. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government* dan penyelenggaraan pemerintahan;
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi penggunaan Teknologi Informasi;
14. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM),
15. penyebaran informasi publik yang efektif, Kampanye publik terkait revolusi mental;

16. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi dalam rangka Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
17. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik sebagai bentuk Penguatan Komisi Informasi Daerah, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Daerah.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program

Penjabaran secara operasional dari kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan strategis untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang adalah program dan kegiatan indikatif yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang dan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan indikatif tersebut merupakan aspek operasional dari suatu tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan Program di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dijelaskan pula di dalam Surat Edaran Bupati Enrekang Nomor tentang Pedoman Penyusunan Renstra OPD Tahun 2019-2023, Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/ atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD.

Langkah-langkah penyusunan program meliputi:

- 1) Identifikasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis OPD, yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan/ atau bentuk pelayanan yang akan dicapai oleh OPD;
- 2) Identifikasi kinerja OPD dan indikator kinerja OPD;
- 3) Penyusunan Outcome dan Indikator Kinerja Program; dan

- 4) Penamaan Program, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator program (*outcomes*).

Penjabaran lebih lanjut dari suatu program adalah kegiatan, dimana kegiatan ini memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi karena pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan diarahkan dalam memenuhi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/ atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Langkah-langkah penyusunan kegiatan meliputi:

- 1) Penyusunan Output Kegiatan; dan
- 2) Penamaan Kegiatan, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator kegiatan (*outputs*), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon IV.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang Tahun 2014–2018 ini memuat 16 program dan 47 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang didanai oleh DAU (Dana Alokasi Umum) dan sebahagian Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di bawah ini akan disajikan rincian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang, sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, Sarana Dan Prasarana Serta Pembinaan SDM Perangkat Daerah;

Dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, Sarana Dan Prasarana Serta Pembinaan SDM Perangkat Daerah hasil yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan akan jasa air, listrik, telepon, surat menyurat, perlengkapan kantor, alat tulis kantor, administrasi kantor, barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan Dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta Dalam mencapai Program Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur, hasil yang diharapkan adalah peningkatan kualitas SDM, terutama SDM Bidang Komunikasi Informatika sesuai tugas dan fungsi dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik;
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - c. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan;
 - d. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
 - e. Pelaksanaan pelelangan barang dan jasa;
 - f. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Dalam Daerah & Peninjauan lapangan;
 - g. Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran;
 - h. Penyediaan peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor;
 - i. Penyediaan bahan bakar minyak kendaraan kantor;
 - j. Pengadaan Peralatan Gedung kantor;
 - k. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor;
 - l. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor;
 - m. Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
 - n. Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - o. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - p. Pengadaan Pakaian Olahraga;
 - q. Diklat Teknis Dan fungsi Bagi PNS Daerah;
 - r. Pengadaan Alat Sound system
2. Program Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah.
- Capaian Program ini adalah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu dan berkualitas, laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu dan berkualitas, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Sedangkan tersedianya laporan keuangan, tersedianya laporan akuntabilitas kinerja OPD, tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja OPD dan tersedianya renstra Diskominfo –Statistik tahun 2019-2024, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Laporan Catatan/Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi kinerja OPD (LAKIP) ;
 - b. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik keuangan Bulan, Triwulan dan Semesteran;

- c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - d. Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja);
 - e. Penyusunan RKA- OPD
 - f. Penyusunan DPA- DPPA Perangkat Daerah
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
- a. Pengembangan Press Release Kegiatan Pemda;
 - b. Pelaksanaan Publikasi Dokumentasi Dan kemitraan media;
 - c. Pelaksanaan Jumpa Pers Pemda;
 - d. Tour Jurnalistik kegiatan Pemda Dan Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik OPD Dan masyarakat;
 - f. Pembangunan Stasiun Radio Suara Massenrempulu;
4. Program Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik.
- a. Pemantauan Dan Pengawasan Tower menara telekomunikasi;
 - b. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Saluran komunikasi public melalui MC;
 - c. Literasi Media Sosial;
 - d. Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum Dan Aduan Masyarakat;
 - e. Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan komunikasi Publik;
 - f. Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat;
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- a. Operasional Pengelolaan PLID (Pengelolaan layanan Informasi Dan Dokumentasi);
 - b. Operasional media Center Pemkab.Enrekang;
 - c. Pembinaan Dan Sosialisasi Kelompok Informasi masyarakat (KIM);
 - d. Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Pembangunan;
 - e. Pembuatan Buletin Majalah Suara Massenrempulu;
 - f. Pembinaan Dan Penayangan Kegiatan Pemda Pada Penyiaran TV Kabel;
 - g. Pengelolaan Data Informasi melalui Aplikasi Sistem Integrasi;
 - h. Operasional Pelayanan Sound Sistem;
 - i. Perawatan Dan Perbaikan Peralatan sound sistem;

6. Program Pengembangan Telematika E-Government
 - a. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Pengembangan Bandwith;
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi;
 - d. Pengembangan Aplikasi Dan Replikasi Sistem informasi;
 - e. Operasional Website Kabupaten Dan website Perangkat Daerah;
 - f. Maintenance Infrastruktur Telematika;
 - g. Sosialisasi Internet Sehat Pada Peserta Didik;

7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
 - a. Pengembangan Sistem data Dan Statistik yang terintegrasi;
 - b. Penyusunan Dan Pengumpulan Data PDRB;
 - c. Penyusunan Profil Kabupaten Enrekang;
 - d. Penyusunan Buku Kabupaten Dan kecamatan Dalam Angka;
 - e. Kajian Penyusunan Buku Metadata Statistik sektoral;
 - f. Penyusunan Database Diskominfo Statistik;
 - g. Penyusunan Buku Tentang Indeks Harga konsumen Dan Inflasi Kab.Enrekang;

Adapun rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran renstra.

5.2. Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa komunikasi;
2. Institusi pemerintah pengguna jasa komunikasi;
3. Kelompok swadaya masyarakat (KIM- Kelompok Informasi masyarakat);
4. Semua pihak yang berkepentingan pada komunikasi, informatika, Telematika Dan statistik.

5.3. Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan, yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD II Kabupaten Enrekang, APBD I Propinsi Sulawesi Selatan APBN dan bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman dan lain-lain).

Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBDKabupaten, APBD Provinsi, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :



NO	URAIAN	Pertumbuha n	2018	Proyeksi				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
				Rp M	Rp M	Rp M	Rp M	Rp M
1	PENDAPATAN	10,16	1013,3	1045	1099,9	1160,9	1235,1	1312,8
1,1	Pendapatan Asli Daerah	34,92	77,1	91,2	108	127,9	151,8	181,5
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34,33	13,5	16,4	20	24,6	30,1	37
1.1.2	Pendaptan Retribusi Daerah	19,81	21	24	27,5	31,3	35,8	41
1.2.3	Pendaptan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	46,33	13,8	16	18,2	20,4	22,6	24,8
1.2.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57,97	28,8	34,7	42,2	51,6	63,3	78,7
1. 2	DANA PERIMBANGAN	9,08	767,5	796,1	827,3	861,5	905	946,2
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak	-9,15	15,5	16,2	16,8	17,5	18,2	18,8
1.2.2	Dana Alokasi Umum	4,24	534,3	555,7	579	604,5	637,8	667,1
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	56,51	217,7	224,2	231,4	239,5	249	260,2
1,3	Lain Lain Pendaptan yang Sah	186,82	168,7	157,7	164,7	171,5	178,3	185,1
1.3.1	Pendapatan Hibah	328,34	34	14,1	16,1	16,1	16,1	16,1
1.3.2	Pendaptan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya	18,35	33,1	35,7	38,3	40,9	43,6	46,2
1.3.3	Dana Penyesuaian	9,67	97,5	101,7	105,9	110,1	114,3	118,5
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	619,61	4,1	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
2	BELANJA DAERAH	13,32	1012,4	1076,3	1141,9	1211,3	1285,9	1364,6
2,1	Belanja Tidak Langsung	11,16	555,1	578	607,1	637,7	670,8	704,8
2.1.1	Belanja Pegawai	2,87	368,9	374,3	381,1	386,4	391,3	395,1
2.1.2	Belanja Bunga	-25,39						
2.1.3	Belanja Subsidi	-43,61	1,9					
2.1.4	Belanja Hibah	122,85	31	31,9	33,1	34,5	35,8	36,9
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	373,99	1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
2.1.6	Belanja bagi Hasil Kepada Kab./Kota dan Pemerintahan Desa		0					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	83,94	151,9	170,5	191,4	215,2	242	271,1
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2,2	Belanja Langsung	17,14	457,3	498,3	534,9	573,6	615,1	659,8
2.2.1	Belanja pegawai		31,6	32	32,4	32,8	33,2	33,6
2.2.2	belanja Barang dan jasa	20,99	265,6	288,2	308,3	329	350,4	372,5
2.2.3	Belanja Modal	15,79	160,1	178,1	194,2	211,8	231,5	253,7

6.1. Indikator Kinerja Kunci /IKK Diskominfo & Statistik dalam
RPJMD Tahun 2014-2018

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dishubkominfo Kabupaten
Enrekang

N O	BIDANG URUSAN/INDI KATOR	RUMUS	Kondi si pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kond isi Kiner ja pada akhir perio de RPJ MD	OPD Terkait Penyedia Data
				2014	2015	2016	2017	2018		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.	Komunikasi dan Informatika									
25.1	Jumlah jaringan komunikasi	$\frac{\text{Jumlah jaringan telepon genggam stasioner}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	5,78	5,89	6	6,11	6,22	6,33	6,44	Kominfo & Statistik
25.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	$\frac{\text{Jumlah wartel/warnet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	0,127	0,129	0,124	0,121	0,119	0,117	0,127	Kominfo & Statistik
25.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah	6	7	9	10	11	12	13	Kominfo & Statistik
25.4	Web site milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Kominfo & Statistik
25.5	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun		2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali		Kominfo & Statistik

MATRIKS BAGIAN I :TARGET DAN INDIKATOR SD

TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF D

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar TPB (3)		
			2019	

Rancangan Awal Renstra Diskominfo Statistik Kab. Enrekang Tahun

2018 - 2023

Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	0.59	65	
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	0.59	65	
	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.59	65	

TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar TPB (3)		
			2019	
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	-	40% dari jumlah PPID Pembantu	5

TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar TPB (3)		
			2019	
Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	70.00	71.00	
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	50%	60%	
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	-	71.00	

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Baseline (2018)	Target Tahunan (3)					
			2019	2020	2021	2022	2023	
BIDANG KOMUNIKASI								
BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK								
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN								
INDIKATOR 9.c.1* : Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.								
PROGRAM 1: Program Peningkatan Akses dan kualitas informasi komunikasi public								
Kegiatan 1 : Pemantauan dan pengawasan menara telekomunikasi (Tower BTS)	Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan menara telekomunikasi	Dok/Laporan	71	75	77	79	81	83
Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Pemantfaatan saluran komunikasi publik melalui MC	Terwujudnya saluran komunikasi public	Kegiatan	-	1	1	1	1	1
Kegiatan 3 : Literasi Media Sosial	Jumlah peserta yang mengikuti Literasi Media	Orang	-	-	150	150	150	150
Kegiatan 4 : Pengelolaan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat	Jumlah isupublik, pendapat umum dan aduan, masyarakat yang dikelola	Layanan	-	3	3	3	3	3
Kegiatan 5 : Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan komunikasi public	Adanya laporan Monev	Laporan	-	2	2	2	2	2
Kegiatan 6 : Gelar aksi pertunjukan rakyat	Tercapainya penyampaian informasi pada masyarakat	Kegiatan	-	1	1	2	2	2

INDIKATOR 9.c.1.(a) : Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.								
PROGRAM 1: Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa								
Kegiatan 1: Pengembangan press relese kegiatan pemda	Terpublikasinya kegiatan Pemda	Dokumen	50	50	50	50	50	50
Kegiatan 2 : Pelaksanaan publikasi, dokumentasi dan kemitraan media	Adanya Dokumen dan jumlah kerjasama media	Media	5	12	12	12	12	12
Kegiatan 3 : Pelaksanaan jumpa pers pemda	Jumlah jumpa pers yang dilaksanakan	Kali	0	2	2	2	2	2
Kegiatan 4 : Tour jurnalistik kegiatan pemda dan mayarakat	Adanya sinergitas media, masyarakat dan pemda	Kegiatan	-	1	1	1	1	1
Kegiatan 5 : Pelaksanan Pelatihan jurnalistik OPD dan Masyarakat	Jumlah OPD/ Masyarkat yang mengikuti pelatihan jurnalistik	Orang/OPD	-	43	43	43	43	43

**BIDANG
TELEMATIKA**

INDIKATOR 9.c.1 (b) : Proporsi individu yang menggunakan internet								
PROGRAM 1: Program Pengembangan Telematika E-Government								
Kegiatan 1 : Pengembangan Jaringan Dan Aplikasi Untuk Pelaksanaan e-Government berbasis TI	Presentase akses jaringan internet dan aplikasi guna mewujudkan pelaksanaan E-Government	%	60	70	75	80	85	90
Kegiatan 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Teknologi Informasi	Meningkatnya Jumlah Pengelolah IT/Admin Aplikasi/Website OPD/Kelurahan/Desa Setiap Tahun	Orang	10	44	61	89	178	200
Kegiatan 3 : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Terjalannya komunikasi antara OPD dan lembaga lainnya dalam rangka peelaksanaan e-government	%	10	60	75	80	90	99
Kegiatan 4 : Operasional Web Site / Aplikasi Pelaksanaan E - Government berbasis Teknologi Internet	Tersebarnya informasi daerah melalui web site Kabupaten dan Website Diskominfo	%	70	80	85	89	93	95

Kegiatan 5 : Maintenance infrastruktur Telematika	Tersedianya konektisitas dan jaringan yang handal	%	-	70	75	80	85	90
Kegiatan 6 : Operasional Pengadaan/Pemasangan Wifi Gratis pada pusat kegiatan masyarakat	Tersedianya wifi gratis bagi masyarakat	Titik per tahun	-	0	15	12	12	6
Kegiatan 7 : Sosialisasi Internet Sehat pada peserta didik	Jumlah Peserta didik yang mengikuti sosialisasi	Orang	-	120	120	120	120	120

BIDANG
INFORMATIKA

INDIKATOR 16.10.2 (c): Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan								
PROGRAM 1: Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi								
Kegiatan 1: Operasional Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	Presentase jumlah informasi publik dan dokumentasi publik yang dikelola oleh PPID melalui Website Pemerintah.	%	45%	50%	55%	60%	65%	70%
Kegiatan 2: Operasional Media Center Pemkab Enrekang	Adanya Pemberitaan Kegiatan Pemda Melalui Media Center	Berita per Tahun	750	800	900	1,000	1,100	1200
Kegiatan 3: Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2.1.Terbinanya Kelompok Informsi masyarakat	KIM per Tahun	12	14	17	22	27	30
Kegiatan 4: Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2.2.Terbentuknya pengurus KIM di Desa/kelurahan	KIM	12		12	12	12	12
Kegiatan 5: Penyelenggaraan Pameran Investasi dan Pembangunan	Ikut sertanya Pemda Enrekang dalam Pameran Pembangunan	kali per tahun	2	3	3	3	3	3
Kegiatan 6: Pembuatan Buletin Majallah Suara Massenrempulu	Terbitnya majallah suarah massenrempul	Eksampler/per Tahun	1000 EKSP Tahun	1200	1200	1200	1200	1200

			2016					
Kegiatan 7 : Pembinaan Pelaku Usaha Penyiaran (TV Kabel)	Terbinanya Pelaku Usaha Penyiaran dan terpublikasinya kegiatan pemda melalui media TV Kabel	Pelaku Usaha	30	30	30	30	30	30
Kegiatan 8 : Penayangan kegiatan pemda melalui Penyiaran TV Kabel	Jumlah Kegiatan pemda yang disiarkan melalui TV Kabel	Siaran	-	12	16	20	24	28
Kegiatan 9 : Pengelolaan Data Informasi melalui aplikasi sistem integrasi	Terkelolaanya data informasi publik kedalam integrasi sistem informasi	jumlah data	0	0	50	60	70	80
Kegiatan 10 : Operasional pelayan sound Sistim	Jumlah palayanan soun sistem	Tahun	1	1	1	1	1	1
Kegiatan 11 : Pengadaan / Pemeliharaan peralatan sound Sistim pada Diskominfo-Statistik	Tersedianya peralatan dan terpeliharanya sound sistem	Paket	1	1	1	1	1	1

BIDANG STATISTIK
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK
INDIKATOR 17.18.1.(b) : Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebaga
PROGRAM 1: Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Baselin e (2018)	Target Tahunan (3)				
				2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan 1 : Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tersedianya data PDRB	Buku	10	30	45	52	52	52
Kegiatan 2 : Penyusunan Profil Kabupaten Enrekang	Tersusunnya profil kabupaten	Buku	-		52			52
Kegiatan 3 : Penyusunan Kabupaten dan Kec amatan dalam Angka	Tersedianya data Enrekang dalam angka dan kecamatan dalam angka	Buku	42 dan 24	42 dan 24	42 dan 24	42 dan 24	42 dan 24	42 dan 24

INDIKATOR 17.18.1.(c) : Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Siste
PROGRAM 1: Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kegiatan 1 : Kajian dan Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya metadata Kab. Enrekang	Buku	-	-	20	-	-	-
Kegiatan 2 : Penyusunan buku tentang indeks harga konsumen dan inflasi Kab. Enrekang	Tersusunnya buku indeks harga konsumen dan inflasi Kab. Enrekang	Buku	-	-	25	30	30	30
Kegiatan 3 : Penyusunan Data Base Diskominfo-Statistik	Tersusunnya Data Base Diskominfo Statistik	Buku	10	10	15	20	20	20

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KABUPATEN / KOTA ENREKANG

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

RANCANGAN PROGRAM

Tujuan	SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal (2018)		Target Kinerja Program			
							Tahun 2019		Tahun 2020	
					Tar get	Rp.	Targe t	Rp.	Tar get	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.02	URUSAN WAJIB							
			NON PELAYANAN DASAR							
		1.02.10	Komunikasi Dan Informatika							
			Misi 3: Mengoptimalkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi							

			*** Pagu / Alokasi Belanja Langsung (Kapasitas Real Kemampuan Fiskal) per OPD 2019 - 2023				5,023,752,000	5,381,172,000
			Jumlah Keseluruhan				5,023,752,000	5,381,172,000
							31.43%	32.13%
T(5), Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan secara profesional dan menjamin rasa aman	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas pelayanan publik. (RPJM-S.19)	1.02.10.10.	Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, Sarana Dan Prasarana, Serta Pembinaan SDM Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran		1,291,624,700	1,578,756,000	1,728,800,000
			Misi 3: Mengoptimalkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi				0.86%	0.37%
T(5) Mewujudkan Kualitas kinerja birokrasi pemerintahan secara profesional dan menjamin rasa aman dan tenteram dalam masyarakat	s(9). Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah	1.02.10.11.	Program Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen Rencana Diskominfo Statistik yang tersedia		16,058,000	43,000,000	19,800,000
							4.38%	9.60%
	3.1.2.Terciptanya sinergi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan	1.02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		213,145,664	220,000,000	516,572,000

			Misi.2 Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral serta beriman dan bertaqwa					37.06%		26.89%
2.4.Meningkatnya akses dan aplikasi Teknologi Terapan	2.4.1 Meningkatkan aplikasi teknologi terapan.	1.02.10.19.	Program Pengembangan Telematika E-Government	Tersedianya jaringan internet dan aplikasi yang terintegrasi guna mewujudkan pelaksanaan E-Government		388,454,800		1,861,996,000		1,447,000,000
								2.19%		6.65%
	3.1.2.Terciptanya sinergi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan	1.02.10.20.	Program Peningkatan Akses dan kualitas informasi komunikasi publik	Persentase Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi Komunikasi Publik		35,000,000		110,000,000		358,000,000
										10.87%
		1.02.10.21.	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi publik	40%	212,533,000	65%	990,000,000	70%	585,000,000
3.2. Memperkuat Sistem Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah	3.2.2 Terwujudnya peningkatan kualitas Perencanaan pembangunan daerah		Misi 3: Mengoptimalkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi	INDIKATOR 17.18.1.(b) : Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.						
		1.02.14.	Statistik					4.38%		13.49%
		1.02.14.00.00.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya pemanfaatan data/informasi/statistik dalam perencanaan pembangunan daerah		115,000,000		220,000,000		726,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2019 – 2023. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator

Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam tabel sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN / KOTA ENREKANG
 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

***Rancangan Awal Renstra 2019 -
 2023*** VERSI RPJMD

Tujuan	SASARAN	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal (2018)		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										peningkatan Target rata-rata	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
1	2	3	4	5	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			RPJM tahun 2019				4,796,814,000		7,608,752,000		8,006,172,000		8,775,000,000		9,653,092,000			
T(5), Mewujudk	Me nin							32.9 1%		22.7 2%		22.6 3%		21.0 0%		20.6 6%		

an kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman	gkatnya Kapasitas kelimagaan birokrasi, kesajahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur	1.25.01.10	Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, Sarana Dan Prasarana, Serta Pembinaan SDM Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	1,291,624,700		1,578,756,000		1,728,800,000		1,812,089,000		1,842,446,000		1,994,280,000			
		1.25.01.10.46	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air &	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik.	1 bul 2 an	45,000,000	1 bul 2 an	46,000,000	1 bul 2 an	48,300,000	1 bul 2 an	52,715,000	1 bul 2 an	53,250,000	bulan	55,912,000	0.20	Diskominfo-Statistik

	(KAS) dalam pel ayanan publik .		Listrik															
		1.25. 1.25. 01.10 .49	Penye diaan Komp onen Instala si Listrik/ Pener angan Bangun an Kantor	Tersedia beberapa Kompone n Instalasi Listrik Kantor	1 5 jeni s	10,0 00,0 00	1 5 jeni s	10,0 00,0 00	1 2 b jenis lin	10,5 00,0 00	1 2 b jenis lin	12,0 00,0 00	1 2 b jenis lin	12,6 00,0 00	1 2 b jenis lin	12,1 20,0 00	0.2 5	Dis ko mi nf o- Sta tistik
		1.25. 1.25. 01.10 .43	Penye diaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perund dangan	Tersedian ya bahan bacaan dan peraturan perundan g- undangan	1 1 eks pl./t hn	14,9 99,5 00	1 1 eks pl./t hn	15,0 00,0 00	1 1 ekspl ./thn	15,7 50,0 00	1 1 ekspl ./thn	18,5 37,0 00	1 1 ekspl ./thn	17,3 63,0 00	1 1 ekspl ./thn	18,2 30,0 00	0.1 7	Dis ko mi nf o- Sta tistik
		1.25. 1.25. 01.10 .58	Rapat- Rapat Koordi nasi dan	Adanya Hasil Koordinasi ,Konsultasi Keluar	pak et	259, 669, 500	pak et	230, 000, 000	paket	280, 000, 000	paket	285, 000, 000	paket	287, 000, 000	1 paket	301, 350, 000	0.1 2	Dis ko mi nf o-

			Konsultasi Keluar Daerah	Daerah													Statistik	
		1.25. 1.25. 01.10 .06	Koordinasi, Konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	Terwujudnya koordinasi , konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	kali	140, 000, 000	3	180, 000, 000	3 bulan	245, 100, 000	0	260, 000, 000	0	273, 000, 000	1 2	177, 000, 000	0.8 1	Diskominfo-Statistik
		1.25. 1.25. 01.10 .39	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran	Adanya laporan pengadministrasian keuangan dan perkantoran	1 2 bulan	286, 150, 000	1 2 bulan	411, 500, 000	1 2 bulan	412, 000, 000	1 2 bulan	414, 500, 000	1 2 bulan	435, 225, 000	1 2 bulan	456, 968, 000	0.5 4	Diskominfo-Statistik
		1.25. 1.25. 01.10 .52	Penyediaan Peralatan	Terpeliharanya kebersihan tempat	1 2 bulan	5,00 0,00 0	1 2 bulan	10,0 00,0 00	1 2 bulan	10,5 00,0 00	1 2 bulan	13,0 00,0 00	1 2 bulan	13,6 50,0 00	1 2 bulan	14,7 00,0 00	1.7 7	Diskominfo

			Kebersihan & Perlen- gkapan Dapur Kantor	kerja														o- Sta- tistik
		1.25. 1.25. 01.10 .33	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	94,000,000	1 paket	121,256,000	1 paket	122,000,000	1 paket	130,300,000	1 paket	111,795,000	1 paket	117,300,000	0.20	Diskominfo- Statistik
		1.25. 1.25. 01.10 .14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	28,815,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	21,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	26,250,000	1 Tahun	19,600,000		Diskominfo- Statistik
		1.25. 1.25. 01.10 .15	Pemeliharaan Rutin / Berkala	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	unit	56,115,000	3 unit	30,000,000	5 unit	31,500,000	7 unit	35,000,000	9 unit	28,000,000	1 unit	29,000,000		Diskominfo-

			a Kenda raan Dinas / Opera sional	al kantor													Sta tist ik	
		1.25. 1.25. 01.10 .17	Pemeli haraa n Rutin / Berkal a Perala tan Gedun g Kantor	Terpelihar anya peralatan gedung kantor	pak et	30,4 25,0 00	4 jeni s	57,0 00,0 00	8 jenis	57,5 00,0 00	1 0 jenis	60,0 00,0 00	1 2 jenis	58,5 00,0 00	1 4 jenis	59,0 00,0 00		Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.10 .27	Penga daan Pakaia n Dinas	Adanya pakaian dinas staf	3 0 org	-	3 0 ora ng	22,0 00,0 00	3 5 org	25,0 00,0 00	3 5 oran g	28,2 50,0 00	3 5 oran g	27,5 00,0 00	3 5 oran g	28,8 00,0 00		Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.10	Pelaks anaan Pelela	Tersedian ya rekanan	pak et per	3,79 7,50	pak et per	15,0 00,0	0 paket per tahu	15,7 50,0	0 paket per tahu	18,5 37,0	0 paket per tahu	19,4 63,0	3 paket per tahu	15,5 00,0	3.9 2	Dis ko mi

		.08	ngan Penga daan Baran g Dan Jasa	penyedia barang / jasa	tah un	0	tah un	00	n	00	n	00	n	00	n	00	nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.10 .04	Pendi dikan Dan Pelatih an Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan fungsi	3 0 peg awa i	125, 713, 200	3 5 peg awa i	170, 000, 000	3 5 Pega wai	175, 000, 000	3 5 pega wai	182, 000, 000	3 5 pega wai	189, 900, 000	3 5 pega wai	195, 000, 000	0.5 2 Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.10 .24	Penga daan kenda raan dinas/ operas ional	Adanya kendaraan dinas operasion al kantor	unit	-	5 unit	88,0 00,0 00	5 unit	92,4 00,0 00	5 unit	97,0 00,0 00	5 unit	101, 850, 000	1 unit	300, 000, 000	1.6 1
		1.25. 1.25. 01.10 .44	Penye diaan Bahan Bakar Minya	Lancarnya Tugas dan fungsi OPD	Tah un	20,0 00,0 00	3 b l n	20,0 00,0 00	3 b l n	25,0 00,0 00	0	30,0 00,0 00	0	31,5 00,0 00	1	35,0 00,0 00	0.6 1 Dis ko mi nf o-

			k kenda raan kantor															Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.10 .30	Penga daan Pakaia n Olahra ga	Adanya pakaian olahraga	3 0 org	15,0 00,0 00	3 0 ora ng	22,0 00,0 00	3 5 org	25,0 00,0 00	3 5 oran g	28,2 50,0 00	3 5 oran g	27,5 00,0 00	3 5 oran g	28,8 00,0 00	0.8 5	Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.10 .23	Penga daan Alat Sound Sistem	Adanya peralatan sound sistem	pak et	156, 940, 000	0 pak et	111, 000, 000	0 paket	116, 500, 000	0 paket	122, 000, 000	paket	128, 100, 000	0 paket	130, 000, 000	(0. 18)	Dis ko mi nf o- Sta tist ik
								0.90 %		0.26 %		0.26 %		0.25 %		0.24 %		
T(5) Mewujudk an Kualitas kinerja birokrasi pemerinta	Ter wuj ud nya pen ing	1.25. 1.25. 01.11	Progra m Penyu sunan Perenc anaan	1. Persentas e Dokumen perencana an yang	16,058,000	43,000,000	19,800,000	21,000,000	22,200,000	23,100,000								

h secara profesional dan menjamin rasa aman dan tenteram dalam masyarakat	kat an kua lita s per enc ana an dan par tisi pas i ma sya rak at dal am pe mb ang una n		Dan Pelapo ran Keuan gan Dan Kinerj a Peran gkat daera h	tersedia																				
				2. Persentas e capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja																				
				3. Persentas e dokumen pelaporan keuangan yang tersedia																				
		1.25. 1.25. 01.11 .30	Penyu sunan Renca na Kerja SKPD (Renja)	Adanya Renja Perangkat Daerah	1	Dok	3,00 0,00 0	1	Dok	3,00 0,00 0	1	Dok	3,30 0,00 0	1	Dok	3,50 0,00 0	1	Dok	3,70 0,00 0	1	Dok	3,85 0,00 0	0.2 4	Dis ko mi nf o- Sta tist ik

1.25. 1.25. 01.11 .32	Penyusunan RKA - SKPD	Tersusunnya RKA-RKAP.Perubahan	2	Dok	2,500,000	2	Dok	3,000,000	2	Dok	3,300,000	2	Dok	3,500,000	2	Dok	3,700,000	2	Dok	3,850,000	0.49	Diskominfo-Statistik
1.25. 1.25. 01.11 .11	Penyusunan DPA - SKPD	Persentase Capaian Kinerja Diskominfo Statistik Yang Termuat Diperjanjian Kinerja	2	Dok	2,500,000	2	Dok	3,000,000	2	Dok	3,300,000	2	Dok	3,500,000	2	Dok	3,700,000	2	Dok	3,850,000	0.49	Diskominfo-Statistik
XXX	Renstra 2018-2023 / Revisi Rancangan Renstra	Tersusunnya Dokumen Renstra untuk lima tahunan	1	Dok				25,000,000			-			-			-			-		
1.25. 1.25. 01.11	Penyusunan Lapora	Adanya Dokumen LAKIP OPD	5	Lap	2,384,00	5	Lap	3,000,00	5	Lap	3,300,00	5	Lap	3,500,00	5	Lap	3,700,00	5	Lap	3,850,00	0.56	Diskominfo

Rancangan Awal Renstra Diskominfo Statistik Kab. Enrekang Tahun 2018 - 2023

					0			0			0			0			0			nf o- Sta tist ik
	.16	n Catata n Kinerj a dan Ikhtisa r Realis asi Kinerj a SKPD (Lakip)																		
	1.25. 1.25. 01.11 .19	Penyu sunan Lapora n Keuan gan Akhir Tahun	Tersusunn ya Laporan Keuangan akhir Tahun	1 Lap	3,00 0,00 0	1 Lap	3,00 0,00 0	1 Lap	3,30 0,00 0	1 Lap	3,50 0,00 0	1 Lap	3,70 0,00 0	1 Lap	3,85 0,00 0	0.2 4				Dis ko mi nf o- Sta tist ik
	1.25. 1.25. 01.11 .20	Penyu sunan Lapora n Keuan gan Bulan, Triwul an, Semes	Tersusunn ya laporan realisasi fisik keuangan bulan dan semestera n	4 lap	2,67 4,00 0	4 lap	3,00 0,00 0	4 lap	3,30 0,00 0	4 lap	3,50 0,00 0	4 lap	3,70 0,00 0	4 lap	3,85 0,00 0	0.3 9				Dis ko mi nf o- Sta tist ik

			teran Dan Akhir Tahun															
	Me nin gka tny a Kap asit as kel em bag aan bir okr asi, kes eja hte raa n dan ko mp ete nsi							4.59 %		8.74 %		6.74 %		6.43 %		6.14 %		
		1.25. 1.25. 01.15	Progra m Penge mbang an Komu nikasi , Inform asi dan Media Massa	Persentas e data potensi dan program Pemda yang dipublikasi kan ke masyaraka t		213, 145, 664		220, 000, 000		665, 000, 000		539, 250, 000		564, 100, 000		592, 305, 000		
		1.25. 1.25. 01.15 .26	Penge mbang an press releas e kegiat an pemd a	Terpublika sinya kegiatan Pemda	1 2 bln	213, 145, 664	1 2 bln	220, 000, 000	1 2 bln	380, 000, 000	1 2 bln	240, 000, 000	1 2 bln	250, 000, 000	1 2 bln	262, 500, 000	0.1 8	Dis ko mi nf o- Sta tistik

	su mb er day a apa rat ur (KA S) dal am pel aya nan pu blik .	1.25. 1.25. 01.15 .28	Pelaks anaan publik asi, doku menta si dan kemitr aan media	Jumlah Dokumen / jumlah kerjasama media	1 0	Me dia	-	Me dia	-	140, 000, 000	Medi a	147, 000, 000	Medi a	170, 000, 000	Medi a	178, 500, 000	-	Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.15 .27	Pelaks anaan jumpa pers pemd a	Jumlah jumpa pers yang dilaksana kan	K a Kali li	-	Kali	-	Kali	40,0 00,0 00	Kali	42,0 00,0 00	Kali	44,1 00,0 00	Kali	46,3 05,0 00	-	Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.15 .32	Tour jurnali stik kegiat an pemd a dan mayar akat	Jumlah media yang bersinergi dengan masyaraka t dan pemda	kegi ata n	-	kegi ata n	-	kegia tan	45,0 00,0 00	kegia tan	47,2 50,0 00	kegia tan	40,0 00,0 00	kegia tan	42,0 00,0 00	-	Dis ko mi nf o- Sta tist ik

		1.25.1.25.01.15.29	Pelaksanaan Pelatihan jurnalistik OPD dan Masyarakat	Jumlah OPD/ Masyarakat yang mengikuti pelatihan jurnalistik	orang	-	orang	-	orang	60,000,000	orang	63,000,000	orang	60,000,000	orang	63,000,000	Diskominfo-Statistik
		XXX	Pembangunan/Operasional Stasiun Radio Suara Massenmpulu	Jumlah stasiun radio Massenmpulu yang beroperasi	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	Diskominfo-Statistik
2.4.Meningkatnya akses dan aplikasi Teknologi Terapan	Meningkatnya Akses		Misi.2 Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral serta beriman dan				33.21%			21.50%		26.80%		21.24%		19.72%	

Da n Apl ikas i tek nol ogi Ter apa n		bertaqwa														
	1.25. 1.25. 01.19	Progra m Penge mbang an Telem atika E- Gover nment	Tersedian ya jaringan internet dan aplikasi yang terintegra si guna mewujudk an pelaksana an E- Governme nt		388, 454, 800		1,59 2,99 6,00 0		1,63 6,00 0,00 0		2,14 6,00 0,00 0		1,86 3,72 0,00 0		1,90 3,95 6,00 0	
	1.25. 1.25. 01.19 .02	Opera sional Websi te Kabup aten Dan Websi te Peran gkat Daera	Jumlah Website	2 jeni s	36,0 00,0 00		40,0 00,0 00		42,0 00,0 00		44,0 00,0 00		46,0 00,0 00		48,0 00,0 00	

	h															
1.25. 1.25. 01.19 .02	Penge mbang an sumbe r Daya Manus ia Pengel ola teknol ogi Inform asi dan Komu nikasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Hardware/ software		-			4 0 org		4 0 org		4 0 org		4 0 org			
		Jumlah Admin Website OPD, Desa/kelu rahan, dan sekolah yang dilatih			4 3 OP D	-	kelur ahan +pus kesm as	269, 000, 000	kelur ahan +pus kesm as	30,0 00,0 00	kelur ahan +pus kesm as	35,0 00,0 00	kelur ahan +pus kesm as	40,0 00,0 00		
1.25. 1.25. 01.19 .15	Maint enenc e infrast ruktur Telem atika	Jumlah Hardware dan Software yang terpelihar a	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	250, 000, 000	2 unit	350, 000, 000	2 unit	40,0 00,0 00	2 unit	42,0 00,0 00		Dis ko mi nf o- Sta tist ik

1.25. 1.25. 01.19 .11	Penge mbang an Sarana Dan Prasar ana Teknol ogi Inform asi Dan Komu nikasi	Jumlah OPD/Desa /Keluraha n/Puskes mas/Sekol ah yang terakses Jaringan WAN	1 OP D	352, 454, 800	3 opd 2 + + Kec 1 am ata n	1,32 2,99 6,00 0	1 Keca 1 mata + n + 1 Pusk 5 esma s	1,02 5,00 0,00 0	8 Kelur + ahan 6 + 0 Desa	1,33 0,00 0,00 0	9 Kelur + ahan 6 + 2 Desa	1,35 8,00 0,00 0	1 sekol 2 ah	1,37 0,00 0,00 0	41. 00	Dis ko mi nf o- Sta tist ik
1.25. 1.25. 01.19 .09	Penge mbang an Bandw ith	Jumlah Bandwith yang tersedia	1 Mb 8 ps		1 Mb 5 ps	230, 000, 000	2 Mbps 0 0		2 Mbps 0 0	250, 000, 000	2 Mbps 0 0	309, 120, 000	2 Mbps 5 0	324, 576, 000	46. 40	
1.25. 1.25. 01.19 .10	Penge mbang an Aplika si/Repl ikasi Sistem Inform asi	Jumlah Aplikasi	Apli kasi	-	0 Apli kasi	-	5 Aplik asi	50,0 00,0 00	5 Aplik asi	72,0 00,0 00	Aplik asi	75,6 00,0 00	Aplik asi	79,3 80,0 00	10 %	Dis ko mi nf o- Sta tist ik

			Sosiali sasi Intern et Sehat pada pesert a didik	Jumlah Peserta didik	0 sisw a	-	0 sisw a	-	1 2 0 siswa	-	1 2 0 siswa	70,0 00,0 00	1 2 0 siswa	-	1 2 0 siswa	-		Dis ko mi nf o- Sta tist ik
										4.71 %		4.81 %			12.4 8%		11.9 1%	
		1.25. 1.25. 01.20	Progra m Pening katan Akses dan kualita s inform asi komu nikasi publik	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadban d			35,0 00,0 00		68,0 62,0 00		358, 000, 000		384, 900, 000		1,09 5,00 0,00 0		1,14 9,75 0,00 0	-
	Me nin gka tny a aks	1.25. 1.25. 01.20 .01	Peman tauan dan penga wasan menar	Tersedian ya hasil pemantau an dan pengawas an menara	7 1 dok /lap ora n		35,0 00,0 00	7 5	68,0 62,0 00	7 7	75,0 00,0 00	7 9	88,0 00,0 00	8 1	95,0 00,0 00	8 3	99,7 50,0 00	

es dan aplikasi teknologi terapan		a telekomunikasi (Tower BTS)	telekomunikasi																			
	1.25.1.25.01.20.02	Pengelolaan dan Pemanfaatan saluran komunikasi publik melalui MC	Terwujudnya saluran komunikasi publik	Kegiatan	-	5	Kegiatan	-	5	Kegiatan	25,000,000	5	Kegiatan	26,000,000	5	Kegiatan	70,000,000	5	Kegiatan	73,500,000		Dis kominfo-Statistik
	1.25.1.25.01.20.03	Literasi Media Sosial	Jumlah peserta yang mengikuti Literasi Media	Orang	-	150	org	-	200	org	60,000,000	250	org	63,000,000	300	org	275,000,000	350	org	288,750,000		Dis kominfo-Statistik
	1.25.1.25.01.20	Pengelolaan isu	Adanya pelayanan aduan	layanan	-	3	lay.	-	3	lay.	40,000,000	3	lay.	42,000,000	3	lay.	260,000,000	3	lay.	273,000,000		Dis kominfo

		.04	publik, penda pat umum dan aduan masya rakat	masyaraka t yang diproses					00		00		000		000		nf o- Sta tist ik	
		1.25. 1.25. 01.20 .05	Monit oring dan evalua si penyel enggar aan komu nikasi publik	Jumlah laporan monitorin g Dan evaluasi	Lap ora n	-	2 4 lap	-	2 4 lap	43,0 00,0 00	2 4 lap	45,1 50,0 00	2 4 lap	50,0 00,0 00	2 4 lap	52,5 00,0 00		Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.20 .06	Gelar aksi pertun jukan rakyat	Tercapain ya penyampa ian informasi pada masyaraka t	Kegi ata n	-	1 keg.	-	2 keg.	115, 000, 000	2 keg.	120, 750, 000	2 keg.	345, 000, 000	2 keg.	362, 250, 000		Dis ko mi nf o- Sta tist ik
						9.25 %		20.6 4%		7.69 %		7.91 %		7.58 %		7.26 %		

		1.25. 1.25. 01.21	Progra m Pening katan kualita s pelaya nan inform asi	Persentas e peningkat an kualitas pelayanan Informasi Publik	212,533,000		990,000,000		585,000,000		633,500,000		665,092,000		700,725,000			
3.1.Mewuj udkan kulaitas kinerja birokrasi pemerinta h secara profesional dalam memenuhi tuntutan pelayanan publik	Me nin gka tny a aks es dan apli kasi tek nol ogi ter apa n	1.25. 1.25. 01.21 .01	Opera sional Pengel olaan Layan an Inform asi dan Doku menta si (PLID)	Presentas e jumlah informasi publik dan dokument asi publik yang dikelola oleh PPID melalui Website Pemerinta h.	4 5 %	68,1 53,0 00	5 0 %	125, 000, 000	5 5 %	45,0 00,0 00	6 0 %	55,0 00,0 00	6 5 %	57,7 50,0 00	7 0 %	75,0 00,0 00	(0. 10)	Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.21 .02	Opera sional Media Center Pemka b Enreka	Jumlah Pemberita an Kegiatan Pemda Melalui Media	4 0 0 Beri ta	24,7 00,0 00	5 0 0 Beri ta	120, 000, 000	6 0 0 Berit a	58,0 00,0 00	7 0 0 Berit a	60,0 00,0 00	8 0 0 Berit a	63,0 00,0 00	9 0 0 Berit a	66,1 50,0 00	1.5 8	Dis ko mi nf o- Sta tist

			ng	Center													ik	
		1.25.01.21.03	Pembi naan dan Sosiali sasi Pemb entuka n Kelom pok Inform asi Masya rakat (KIM)	Terbinany a Dan Tersosialis asinya pembentu kan Kelompok Inform si masyaraka t di tingkat Desa/Kelu rahan	1 2 Kim	26,6 80,0 00	1 2 Kim	70,0 00,0 00	1 4 Kim	40,0 00,0 00	1 6 Kim	41,0 00,0 00	1 8 Kim	43,0 50,0 00	2 0 Kim	37,5 00,0 00	0.5 7	Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25.01.21.04	Penyel enggar aan Pamer an Invest asi dan Pemba nguna n	Ikut sertanya Pemda Enrekang dalam Pameran Pembangu nan	3 keg	45,0 00,0 00	3 keg	250, 000, 000	3 keg	167, 000, 000	3 keg	170, 000, 000	3 keg	178, 500, 000	3 keg	180, 000, 000	2.9 7	Dis ko mi nf o- Sta tist ik

		1.25.1.25.01.21.05	Pembuatan Buletin Majalah Suara Maserempulu	Jumlah Buletin Majalah Suara Maserempulu yang terbit	eks emplar /tahun	-	1200	eks emplar /tahun	-	1200	ekse mpla r/tahun	36,000,000	1200	ekse mpla r/tahun	46,000,000	1200	ekse mpla r/tahun	48,300,000	1200	ekse mpla r/tahun	50,715,000	0.36	Dis ko mi nf o- Sta tistik
		1.25.1.25.01.21.06	Pembi naan dan Penay anan Kegiat an Pemda pada TV Kabel	Terbinanya Pelaku Usaha Penyiaran dan terpublikasiny kegiatan pemda melalui media TV Kabel	Pelaku Usaha	-	300	Pelaku Usaha	150,000,000	300	Pelaku Usaha	62,000,000	300	Pelaku Usaha	65,000,000	300	Pelaku Usaha	68,250,000	300	Pelaku Usaha	71,660,000	(0.54)	Dis ko mi nf o- Sta tistik
		1.25.1.25.01.21.07	Pengel olaan Data Inform	Terkelolaa nya data informasi publik	Data	-	50	Data	-	50	Data	40,000,000	60	Data	52,650,000	70	Data	55,200,000	80	Data	59,700,000	-	Dis ko mi nf

			asi melalu i aplikas i sistem integr asi	kedalam integrasi sistem informasi														o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.21 .08	Opera sional Pelaya nan Sound Sistem	Jumlah palayanan sound sistem selama setahun	4 7 Pela y/th n	48,0 00,0 00	4 7 Pela y/th n	160, 000, 000	4 7 Pelay /thn	77,0 00,0 00	4 7 Pelay /thn	80,8 50,0 00	4 7 Pelay /thn	84,8 90,0 00	4 7 Pelay /thn	90,0 00,0 00	0.7 9	Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.21 .10	Peraw atan Dan Perbai kan Peralat an Sound Sistem	Tersedian ya peralatan dan terpelihar anya sound sistem	1 pak et	-	1 pak et	115, 000, 000	1 paket	60,0 00,0 00	1 paket	63,0 00,0 00	1 paket	66,1 52,0 00	1 paket	70,0 00,0 00		Dis ko mi nf o- Sta tist ik
			Misi 3: Meng optim alkan	INDIKATO R 17.18.1.(b) :		5.01 %		2.69 %		9.15 %		5.80 %		5.56 %		8.66 %		

			Tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.															
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Memperkuat Sistem Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi, kesediaan dan kompetensi sumber daya	1.23. 1.25. 01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Cakupan OPD yang mengakses data dan informasi daerah yang terintegrasi	115,000,000		129,000,000		696,500,000		464,200,000		487,660,000		836,000,000			
		1.23. 1.25. 01.15 .12	Pengembangan Sistem Data Dan Statistik yang terintegrasi	Tersedianya Data yang valid dan terbarukan	- bln	-	1 2 bln	80,000,000	1 2 bln	155,000,000	1 2 bln	160,000,000	1 2 bln	165,000,000	1 2 bln	170,000,000	-	Diskominfo-Statistik
		1.23. 1.25. 01.15 .03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Tersedianya data PDRB	Buku	30,000,000	30 Buku	29,000,000	45 Buku	32,000,000	52 Buku	35,000,000	52 Buku	38,000,000	52 Buku	41,000,000		Diskominfo-Statistik

	apa rat ur(KA S) dal am pel aya nan pu blik	1.23. 1.25. 01.15 .14	Penyu suana n Profil Kabup aten Enreka ng	Tersusunn ya profil kabupaten	Buk u	-	Buk u	-	3 0 Buku	55,5 00,0 00	0 Buku	-	Buku	-	3 5 Buku	70,0 00,0 00		Dis ko mi nf o- Sta tist ik
	1.23. 1.25. 01.15 .13	Penyu sunan Kabup aten dan Kecam atan dalam Angka	Tersedian ya data Enrekang dalam angka dan kecamata n dalam angka	Buk u	85,0 00,0 00	4 2 d a n Buk u	-	4 2 d a n Buku	104, 000, 000	4 2 d a n Buku	109, 200, 000	4 2 d a n Buku	114, 660, 000	4 2 d a n Buku	125, 000, 000		Dis ko mi nf o- Sta tist ik	
	1.23. 1.25. 01.15 .16	Kajian dan Penyu sunan Buku Metad ata Statisti k Sektor al	Tersusunn ya metadata Kab. Enrekang	Buk u	-	Buk u	-	2 0 Buku	200, 000, 000	0 Buku	-	Buku	-	2 5 Buku	250, 000, 000		Dis ko mi nf o- Sta tist ik	

		XXX	Penyusunan Database Diskominfo-Statistik	Tersedian ya Database OPD	Buku		Buku	20,000,000	Buku	-	Buku	-	Buku	-	Buku	-		
		1.23.1.25.01.15.15	Penyusunan Buku Tentang Indeks Harga Konsumen	Tersedian ya data indeks harga konsumen Kabupaten Enrekang	Buku	-	Buku	-	25 Buku	150,000,000	30 Buku	160,000,000	35 Buku	170,000,000	40 Buku	180,000,000		Diskominfo-Statistik
						0.00%		0.00%		16.75%		17.24%		10.15%		1.44%		
		1.23.1.25.01.15.22	Program Pengembangan kapasitas kelembagaan Dan	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menerapkan e-Government	-	-			1,274,250,000	1,380,000,000	891,000,000	139,000,000						

			Refor masi Birokr asi (rpjm)														
		1.25. 1.25. 01.22 .01	Penge mbang an Data Center Dan Comm and Center	Jumlah Data Centre dan Command Centre	Unit		0 Unit		1 Unit	1,10 0,00 0,00 0	1 Unit	1,20 0,00 0,00 0	2 Unit	700, 000, 000	0 Unit		
		1.25. 1.25. 01.20 .02	Penge mbang an Dashb oard Execut if	tersediany a Dashboard Eksekutif	2 Jeni s	-				88,0 00,0 00		90,0 00,0 00		95,0 00,0 00		100, 000, 000	Dis ko mi nf o- Sta tist ik
		1.25. 1.25. 01.20 .03	Integr asi web servic e	Tersedian ya layanan perbaikan web terintegra si	0 org	-		-		31,2 50,0 00		33,0 00,0 00		36,0 00,0 00		39,0 00,0 00	Dis ko mi nf o- Sta tist

[illegible]

			dan teleko munik asi (rpjm)																			
		1.23.1.25.01.15.23.01	Survey / pendataan pengguna telepon genggam dan jaringan internet Kabupaten Enreka ng	tersediany a data pengguna an telephone genggam dan akses jaringan internet					175,000,000			210,000,000			225,000,000			250,000,000			275,000,000	

Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah

Kabupaten Enrekang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline 2017	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya aksesibilitas ke sentra-sentra produksi pertanian dan daerah terisolir	panjang jalan (Hotmix, Lapen, Beton) dalam kondisi baik/nyaman dilalui	497,59 km	509 km	520,41 km	531,82 km	543,23 km	554,64 km	566,05 km
		panjang jalan (pengerasan, tanah) dalam kondisi baik/nyaman dilalui	435,90 km	481,09 km	526,28 km	571,47 km	616,67 km	661,85 km	707,04 km
		panjang jalan yang ditingkatkan dari pengerasan menjadi Hotmix/lapen/beton	355,26 km	363,26 km	371,76 km	380,26 km	388,76 km	397,26 km	405,76 km
		Panjang jalan yang ditingkatkan dari jalan tanah menjadi pengerasan	148,06 km	185,08 km	222,1 km	259,12 km	296,14 km	333,16 km	370,18 km
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pertanian	Panjang JUT yang ditingkatkan menjadi JUT Produksi	22,82 km	31,07 km	39,32 km	47,57 km	55,82 km	64,07 km	72,32 km
		Jumlah P3A/GP3A aktif dalam pengelolaan system irigasi partisipatif	45	50	55	60	65	70	75
		Persentase DI yang system jaringan irigasinya berfungsi baik	81,13%	86,98%	89,58%	92,18%	94,78%	97,38%	100%
2	Terwujudnya Kota Enrekang bebas genangan air	Rasio genangan air dengan luas wilayah Kota Enrekang	-	-	0	0	0	0	0
	Terciptanya keindahan kota yang didukung ketersediaan	Penghargaan keindahan dan kebersihan kota	-	-	1	1	1	1	1

	prasarana dan sarana utilitas umum yang cukup memadai								
	Terciptanya kemandirian pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa	Jumlah Desa Berstatus SWASEMBADA	0	0	0	0	0	0	1
3	Terpenuhinya kebutuhan air bersih perkotaan dan perdesaan	Tingkat akses air minum masyarakat yang aman dengan system JP dan BJP terlindungi	27.500 KK	28.666 KK	29.832 KK	30.998 KK	32.164 KK	33.330 KK	34.500 KK
	Tersedianya sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman	Persentase timbulan sampah yang terangkut	75% dari 97,7M ³ timbulan sampah	75% dari 97,7M ³ timbulan sampah	80%	85%	90%	95%	100%
		Cakupan layanan persampahan	8.020 RT	8.250 RT	8.580	8.910	9.240	9.570	9.900
		Jumlah pelayanan SPAM IKK	4.766 IKK	5.266	5.595	5.924	6.253	6.582	6.911
		Jumah masyarakat yg menggunakan jamban	1.256 KK	1.605 KK	2.105	2.605	3.105	3.605	4.155
	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik	Persentase RT yang dialiri listrik	98,02 %	98,87%	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	70,38	70,38	70,42	70,47	70,52	70,57	70,62
5	Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13,66	13,66	13,71	13,76	13,79	13,84	13,89
	Terciptanya pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan	Angka Melek Huruf	92,24%	92,24%	93,79	95,34	96,89	98,44	100
6	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Cakupan Layanan Perpustakaan Daerah	129 desa/kel	129 desa/kel	129 desa/kel	129 desa/kel	129 desa/kel	129 desa/kel	129 desa/kel
7	Meningkatnya akses dan aplikasi	Cakupan wilayah terjangkau	11	11 kec.	12 kec.	12 kec.	12 kec.	12 kec.	12 kec.

	teknologi terapan	internet dan jaringan telekomunikasi seluler	kecamatan						
8	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masyarakat	Jumlah kelompok kegiatan rutin keagamaan yang aktif	839	839	851	863	875	887	899
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana ibadah	Rasio tempat ibadah per-satuan penduduk	1:264	1:264	1:264	1:264	1:264	1:264	1:264
9	Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan pegawai dan kompetensi sumber daya aparatur dalam pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	Cukup baik	Cukup baik	baik	baik	baik	baik	Baik
	Terciptanya sinergi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan	Persentase rata-rata usulan prioritas masyarakat tingkat desa yg terealisasi dlm APBD	90%	90%	100	100	100	100	100
10	Terciptanya kesadaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi elemen masyarakat dalam Musrenbang Desa	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	92%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat	Persentase penanganan masalah Kantibmas	85%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
12	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek	Indeks Pembangunan Gender	33%	33%	40%	45%	47%	50%	55%

13	Terwujudnya sistem pemasaran dan daya saing produk dan komoditi unggulan daerah melalui penerapan IPTEK	Pertumbuhan nilai produksi komoditi unggulan daerah	5,92%	5,92%	6,00%	6,23%	6,50%	6,89%	7,14%
	Terwujudnya kemandirian kelembagaan pelaku usaha tani	Jumlah kelompok tani mandiri	45 KlpK	45 Klpk	50 Klpk	55 Klpk	60 Klpk	65 Klpk	70 Klpk
	Terwujudnya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase KUKM yang aktif mandiri	68%	75%	80%	84%	89%	93%	95%
14	Terwujudnya peningkatan produktivitas kawasan pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan	Peningkatan Produktivitas Daerah	-	--	Sama atau diatas angka Provensi	Sama atau diatas angka Provensi	Sama atau diatas angka Provensi	Sama atau diatas angka Provensi	Sama atau diatas angka Provensi
	Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbagai komoditi unggulan daerah	Persentase komoditi unggulan daerah yang melalui prosessing	35%	40%	45%	50%	53%	55%	60%
15	Tersedianya pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau	Tingkat Pola Pangan Harapan	94,70%	94,70%	97,20%	99,30%	100%	100%	100%
16	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	6,89	6,89	7,49	7,54	7,60	7,64	7,69
		Tingkat kemiskinan	13,20%	13,20%	12,14%	12,64%	11,84%	11,24%	10,29%
17	Terwujudnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata, terhadap PDRB	9,57	9,57	10,17	10,23	10,29	10,35	10,41
18	Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Persentase jumlah usaha yang mentaati persyaratan adm. Dan tehnis pencemaran lingkungan	85%	85%	87%	90%	93%	97%	100%
	Berkembangnya sistem pertanian organik dan ramah lingkungan	Jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan system pertanian organic	97 Klpk	97 Klpk	100 Klpk	110 klpk	120 klpk	130 klpm	140 klpk
	Meningkatnya pemanfaatan	Luas lahan tidur yang dikelola	69 Ha	69 Ha	74 Ha	79 Ha	88 Ha	98 Ha	108 Ha

lahan-lahan tidur

menjadi lahan produktif



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Program Transisi

Renstra OPD Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Enrekang, tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 . Jangka waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Enrekang tersebut mengikuti jangka waktu masa jabatan Bupati Enrekang Tahun 2018-2023 yang jatuh pada akhir tahun 2019.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Enrekang, di mana untuk mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2019, yang harus disusun tahun 2019, sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Renja SKPD Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD, maka pada akhir tahun masa jabatan, Bupati Enrekang berkewajiban menyiapkan rancangan RKPD Tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2019 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2019.

Demikian pula dengan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Enrekang Tahun 2018-2023, untuk menjembatani kekosongan payung/acuan bagi penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Enrekang Tahun 2019 diperlukan program transisi, yang merupakan program-program prioritas yang harus ditangani sampai Tahun 2019.

Program-program prioritas yang masuk dalam program transisi tahun 2019 pada Renstra SKPD Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Enrekang 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan dan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Kinerja;
6. Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
7. Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa
8. Program Pengembangan Telematika E-Government
9. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
10. Program Peningkatan Akses dan kualitas informasi komunikasi publik
11. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2018 -2023 adalah dokumen rencana pembangunan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang berwawasan 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah dan kegiatannya bersifat indikatif.

Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang merupakan suatu kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang, sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal yang merupakan langkah yang penting dalam memperhitungkan peluang dan tantangan serta lingkungan internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan). Rencana tersebut berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari SKPD sehingga selama kurun waktu 5 (lima) tahun rencana strategis yang dibuat tersebut tetap bisa dijadikan acuan serta diimplementasikan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD.

8.3. Penutup

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2023 adalah kerangka kebijakan Diskominfo untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Menurut Skalanya, Renstra merupakan perencanaan yang dibuat sekali dalam 5 tahun SKPD, yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama bidang-bidang yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Implementasi Renstra Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, masih memungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya dinamika dan perubahan kebijakan, permasalahan, hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Selanjutnya, dokumen renstra secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Enrekang sebagai bagian dari proses pencapaian visi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang yaitu “

Menjadi Pusat Data, Informasi Dan Komunikasi yang Cepat Terpercaya Beretika Dan Bermartabat untuk Mewujudkan EMAS.”

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

 pdfelement

